



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya unit kearsipan menyiapkan rancangan kebijakan kearsipan untuk ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip;
  - b. bahwa untuk pengaturan lebih lanjut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 4);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSTRUMEN  
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga Pendidikan, Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9. Unit Kerja adalah satuan kerja atau unit yang menjalankan salah satu tugas dan fungsi organisasi.



10. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
11. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.
12. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
13. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip statis kepada lembaga kearsipan.
14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
15. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis Arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip fasilitatif.
16. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip substantif.
17. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
18. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada Unit Pengolah.
19. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada Unit kearsipan/Pusat Arsip.



20. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis Arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
21. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis Arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada Lembaga kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
22. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
23. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan Arsip Dinamis yang dihasilkan dan pengelompokannya.
24. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
25. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
26. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi Arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
27. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
28. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
29. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.



30. Biasa/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
31. Tingkat klasifikasi keamanan akses Arsip dinamis adalah pengelompokan Arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan<sup>nya</sup> Peraturan Gubernur ini yaitu:
  - a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menciptakan keseragaman dalam penggunaan kode klasifikasi, penentuan hak akses dan keamanan serta penentuan masa simpan Arsip dalam keseluruhan proses pengelolaan Arsip;
  - b. sebagai sumber informasi pengelolaan Arsip yang mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan.
- (2) Tujuan ditetapkan<sup>nya</sup> Peraturan Gubernur ini yaitu:
  - a. terwujudnya layanan Arsip secara cepat, tepat, dan aman; dan
  - b. terwujudnya sistem pengelolaan Arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan Arsip.

### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta Jadwal Retensi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta Arsip yang meliputi:
  - a. fungsi fasilitatif; dan
  - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi urusan:
  - a. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. perlengkapan;
  - c. pengadaan;
  - d. perpustakaan;
  - e. kearsipan;
  - f. persandian;



- g. perencanaan pembangunan;
- h. organisasi dan tatalaksana;
- i. penelitian pengkajian, pengembangan;
- j. hokum;
- k. hubungan masyarakat;
- l. pengawasan internal;
- m. sumber daya manusia;
- n. pendidikan dan pelatihan; dan
- o. keuangan daerah.

(3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi urusan:

- a. otonomi daerah;
- b. pemerintahan umum;
- c. kesatuan bangsa dan politik;
- d. pemilu;
- e. satuan polisi pamong praja;
- f. penanggulangan bencana, pencarian, pertolongan;
- g. pembangunan daerah tertinggal;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pendidikan;
- j. keolahragaan;
- k. kepemudaan;
- l. kebudayaan;
- m. kesehatan;
- n. agama dan kepercayaan;
- o. social;
- p. pemberdayaan masyarakat desa;
- q. pertamanan dan pemakaman;
- r. kependudukan dan catatan sipil;
- s. keluarga berencana;
- t. ketahanan pangan;
- u. perdagangan;
- v. koperasi dan ukm;
- w. kehutanan;
- x. kelautan dan perikanan;
- y. pertanian;
- z. peternakan;
- aa. perkebunan;
- bb. perindustrian;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perhubungan;
- ee. komunikasi dan informatika;
- ff. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- gg. statistik;
- hh. ketenagakerjaan;
- ii. penanaman modal;
- jj. pertanahan;



- kk. transmigrasi;
- ll. pekerjaan umum;
- mm. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; nn. tata ruang (tata kota); dan
- nn. lingkungan hidup.

### BAB III KLASIFIKASI ARSIP

#### Pasal 4

- (1) Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kode klasifikasi Arsip yang digunakan menggunakan sistem pengkodean berdasarkan angka (*numeric*).
- (3) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali Arsip.

### BAB IV JRA

#### Pasal 5

- (1) JRA Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) JRA Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan fasilitatif dan substantif.
- (3) JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat jenis Arsip, retensi Arsip, dan keterangan.
- (4) Ketentuan mengenai JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

- (1) Urusan fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
  - a. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. perlengkapan;



- c. pengadaan;
- d. perpustakaan;
- e. kearsipan;
- f. persandian;
- g. perencanaan pembangunan;
- h. organisasi dan tatalaksana;
- i. penelitian pengkajian, pengembangan;
- j. hokum;
- k. hubungan masyarakat;
- l. pengawasan internal;
- m. sumber daya manusia;
- n. pendidikan dan pelatihan; dan
- o. keuangan daerah.

(2) Urusan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. otonomi daerah;
- b. pemerintahan umum;
- c. kesatuan bangsa dan politik;
- d. pemilu;
- e. satuan polisi pamong praja;
- f. penanggulangan bencana, pencarian, pertolongan;
- g. pembangunan daerah tertinggal;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pendidikan;
- j. keolahragaan;
- k. kepemudaan;
- l. kebudayaan;
- m. kesehatan;
- n. agama dan kepercayaan;
- o. social;
- p. pemberdayaan masyarakat desa;
- q. pertamanan dan pemakaman;
- r. kependudukan dan catatan sipil;
- s. keluarga berencana;
- t. ketahanan pangan;
- u. perdagangan;
- v. koperasi dan ukm;
- w. kehutanan;
- x. kelautan dan perikanan;
- y. pertanian;
- z. peternakan;
- aa. perkebunan;
- bb. perindustrian;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perhubungan;
- ee. komunikasi dan informatika;
- ff. pariwisata dan ekonomi kreatif;



- gg. statistik;
- hh. ketenagakerjaan;
- ii. penanaman modal;
- jj. pertanahan;
- kk. transmigrasi;
- ll. pekerjaan umum;
- mm. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- nn. tata ruang (tata kota); dan
- oo. lingkungan Hidup.

#### Pasal 7

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.
- (2) Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
  - b. Retensi Arsip dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

#### Pasal 8

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
  - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
  - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan

#### Pasal 9

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Gubernur meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses Arsip.



## Pasal 10

Arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkat informasi yaitu:

- a. Sangat Rahasia;
- b. Rahasia;
- c. Terbatas; dan
- d. Biasa.

## Pasal 11

Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis ditentukan berdasarkan:

- a. ketentuan hukum; dan
- b. analisis fungsi unit kerja dan uraian jabatan (job description).

## BAB V

## KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

## Pasal 12

- (1) Hak Akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat eselon II;
  - b. pejabat eselon III/administrator/jabatan yang setara dengan eselon III; dan
  - c. pejabat eselon IV/pengawas/jabatan yang setara dengan eselon IV.

## Pasal 13

- (1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penentu Kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu kepala daerah/Instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.



2. pimpinan tingkat tinggi, yaitu sekretaris, Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
  3. pimpinan tingkat menengah, yaitu Kepala Sub Bidang, atau Sub Koordinator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses Arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya, kecuali sudah mendapatkan izin.
- b. pelaksana kebijakan, yaitu staf, fungsional umum atau fungsional tertentu, dan pelaksana, yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses dengan Arsip dengan tingkat klasifikasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, yang terdapat pada Pimpinan Tingkat Tertinggi, Pimpinan Tingkat Tinggi, Pimpinan Tingkat Menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapat izin; dan
  - c. Pengawas Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori biasa/terbuka;
  - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Keuangan Pembangunan; dan



- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara/proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

## BAB VI UNIT PENGOLAH

### Pasal 14

Unit Pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan Arsip bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi Arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Maret 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9.



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS  
(KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM

KLASIFIKASI ARSIP

000	UMUM	
000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN	
000.1.1	Telekomunikasi	
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
	000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
	000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
	000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri	
	000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
	000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
	000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)	
000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)	
000.1.6	Penyediaan Konsumsi	
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas	
	000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
	000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	
	000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape
	000.1.8.2	Penghijauan
	000.1.8.3	Perbaikan Gedung
	000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
	000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
	000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	
	000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan
	000.1.9.2	Pemasangan



000.1.10	Ketertiban dan Keamanan
000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
<b>000.2</b>	<b>PERLENGKAPAN</b>
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor
000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3	Distribusi
000.2.3.1	Barang habis pakai
000.2.3.2	Barang milik daerah
000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)
000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah



000.3	<b>PENGADAAN</b>	
	000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)
	000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)
	000.3.7	Pembinaan dan Advokasi (antara lain: Advokasi, Kelembagaan, dan SDM)
000.4	<b>PERPUSTAKAAN</b>	
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
	000.4.3	Koleksi Pustaka
	000.4.3.1	Pembelian
	000.4.3.2	Hibah
	000.4.3.3	Hadiah
	000.4.3.4	Tukar Menukar
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR

	000.4.3.6	Terbitan Internal
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4		Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6		Layanan Perpustakaan
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
	000.4.6.4	Pengembalian
	000.4.6.5	Perpustakaan Keliling (Pusling) dalam kota
	000.4.6.6	Perpustakaan Keliling (Pusling) luar kota/pelosok kota
	000.4.6.7	<i>Go-Book</i>
	000.4.6.8	Laper Sesaat
	000.4.6.9	Inovasi Layanan
	000.4.6.10	Buncu Baca Indoor
	000.4.6.11	Buncu Baca Outdoor
	000.4.6.12	Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Offline
	000.4.6.13	Pengelolaan Kotak Saran Offline
000.4.7		Kerjasama Perpustakaan
	000.4.7.1	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
	000.4.8.1	Pengembangan situs web
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
	000.4.8.5	Pengembangan aplikasi iKaltim
	000.4.8.6	Pengembangan web. Pustaka Borneo
	000.4.8.7	Pengembangan SMS Reminder
	000.4.8.8	Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Online
	000.4.8.9	Pengelolaan Kotak Saran Online
000.4.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
	000.4.9.1	Data Layanan Perpustakaan SMA/SMK
	000.4.9.2	Data Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi
	000.4.9.3	Data Layanan Perpustakaan Kota/Kabupaten



	000.4.9.4	Data Layanan Perpustakaan Instansi Daerah
	000.4.9.5	Data Layanan Perpustakaan BUMN
	000.4.9.6	Data Layanan Perpustakaan BUMD
	000.4.9.7	Data Layanan Perpustakaan Organisasi Swasta
	000.4.9.8	Data Layanan Perpustakaan Perorangan
	000.4.9.9	Data Layanan Pegiat Literasi
000.4.10	Konservasi	
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
000.4.12	Transformasi Digital	
000.4.13	Kurasi Digital	
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
	000.4.14.5	Pembudayaan Kegemaran Membaca
	000.4.14.6	Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca ( GPMB )
	000.4.14.7	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
	000.4.14.8	Kajian Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat (IPLM)
	000.4.14.9	Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)
	000.4.14.10	Nomor Pokok Perpustakaan ( NPP )
	000.4.14.11	Akreditasi Perpustakaan
	000.4.14.12	Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah
	000.4.14.13	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan
	000.4.14.14	Bantuan / Stimulan Pengembangan Perpustakaan
	000.4.14.15	Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan
<b>000.5</b>	<b>KEARSIPAN</b>	
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis

000.5.2.3	Penilaian Arsiparis (antara lain: Penilaian Arsiparis Terampil dan Penilaian Arsiparis Ahli )
000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan ( antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
000.5.2.5	Data Base Arsiparis
000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)
000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)
000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
000.5.2.12	Bimbingan Teknis Kearsipan
000.5.2.13	Pengembangan wawasan arsiparis ( antara lain : Sertifikasi Arsiparis dan Uji Kompetensi Arsiparis )
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)



000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)
000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
000.5.6	Penyusutan Arsip
000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)
000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang dialihmediakan)
000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis
000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)
000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)
000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
000.5.9.7	Preservasi Kuratif
000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)
000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber, Pembuatan Citra Daerah, Pameran Kearsipan )
000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip, Wisata Arsip, Siaga Arsip dan Edukasi Kearsipan )
000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN
000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana



000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
000.5.15	Pengawasan Kearsipan
000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal (antara lain : PKPKT, Instrumen Pengawasan Kearsipan, Laporan Hasil Pengawasan)
000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal (antara lain: PKPKT, Instrumen Pengawasan Kearsipan, Laporan Hasil Pengawasan)
000.5.15.3	Sanksi
000.5.15.4	Pemilihan OPD Terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi
000.5.15.5	Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kab / Kota Terbaik Tingkat Provinsi

**000.6      PERSANDIAN**

000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.6.2	Pengamanan persandian
000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
000.6.3.3	Pelaksanaan
000.6.3.4	Pelaporan
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian
000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
000.6.4.2	Jaring Komunikasi
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik
000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
000.6.5.7	Pelaporan

**000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
000.7.1.2	Musrenbang Nasional
000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
000.7.1.6	Musrenbang Desa
000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah
000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
000.7.2.6	Program kerja tahunan
000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
000.7.2.8	Laporan Berkala
000.7.2.9	Laporan Insidental
000.7.2.10	Evaluasi Program
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan
000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
000.7.6	Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah



- 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
- 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
- 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
- 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

## **000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

- 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
  - 000.8.1.1 Pembentukan
  - 000.8.1.2 Pengubahan
  - 000.8.1.3 Pembubaran
- 000.8.2 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
  - 000.8.2.1 Analisa Jabatan
  - 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
- 000.8.3 Ketatalaksanaan
  - 000.8.3.1 Proses Bisnis
  - 000.8.3.2 Standar Pelayanan
  - 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
  - 000.8.3.4 Pelayanan Publik
- 000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
- 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
- 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
  - 000.8.6.1 Budaya Kerja
  - 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
  - 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN**

- 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)
- 000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
- 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan

000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6.1	Data
000.9.6.2	Statistik
000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop
000.9.11	Invensi
000.9.11.1	Invensi Produk
000.9.11.2	Invensi Proses
000.9.11.3	HKI Invensi
000.9.12	Inovasi
000.9.12.1	Inovasi Produk
000.9.12.2	Inovasi Produk Layanan
000.9.12.3	Inovasi Proses
000.9.12.4	HKI Inovasi

## **100 PEMERINTAHAN**

### **100.1 OTONOMI DAERAH**

100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
---------	--

100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
100.1.4.5	Assosiasi Daerah
100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi )
100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
<b>100.2</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>
100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama
100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah



	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.2.6	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
	100.2.2.7	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
	100.2.2.8	Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
	100.2.2.9	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
<b>100.3</b>	<b>HUKUM</b>	
100.3.1	Program Legislasi	
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
	100.3.1.2	Program Legislasi
100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	
100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota

	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat Perintah	
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan	
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk
100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	

**200 POLITIK****200.1****KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara (antara lain: Duta Pancasila, Paskibraka)
200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
200.1.2.3	Bela Negara
200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.2.6	Gerakan Nasional Revolusi Mental (antara lain: Karakter Bangsa)
200.1.3	Kewaspadaan Nasional
200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan (antara lain: FGD, Komunikasi Sosial, Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Inteligen, Rakor Forum Komunikasi, Monitoring dan Evaluasi)
200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
200.1.4.1	Ketahanan Seni
200.1.4.2	Ketahanan Budaya
200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
200.1.4.6	Fasilitasi
200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri
200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik (antara lain: TP3D, Pokja IDI, Aplikasi SIPPDEH dengan Kab/Kota sosial, Sosialisasi)



		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah
		200.1.5.7	Database Parpol
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
		200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
		200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
<b>200.2</b>	<b>PEMILU</b>		
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
		200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
		200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
		200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
		200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
		200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
		200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
		200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR

	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	

**300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN****300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

- 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
- 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
  - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja (antara lain: Operasional dan Pengendalian, Pengamanan pengawalan protokoler)
  - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
- 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
- 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
- 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - 300.1.5.1 Surat Perintah Penyidikan dan Penyidikan (Sprindik)
  - 300.1.5.2 Surat Perintah Penahanan.
  - 300.1.5.3 Surat Permintaan.
  - 300.1.5.4 Surat Pemberitahuan.
  - 300.1.5.4 Berita Acara.
- 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

**300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN**

- 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
  - 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
  - 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
  - 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
  - 300.2.2.4 Per masyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
  - 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
  - 300.2.2.6 Registrasi BEACON
- 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
  - 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan



	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	
300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	
300.2.8	Operasi Komunikasi	
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
	300.2.8.3	Registrasi BEACON
300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	
300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	
300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	
300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi	
	300.2.12.1	Laporan Harian
	300.2.12.2	Laporan Bulanan
	300.2.12.3	Laporoan Tahunan
	300.2.12.4	Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.1.2	Pembangunan Sumber Daya	
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur

	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus

400.1.6.7                      Pemantauan dan evaluasi

**400.2                      PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 400.2.1                      Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  
- 400.2.2                      Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
  - 400.2.2.1                      Data gender
  - 400.2.2.2                      Advokasi dan fasilitasi
  - 400.2.2.3                      Monitoring, Evaluasi, Analisis dan Pendampingan PUG
  - 400.2.2.4                      Sosialisasi PUG Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosbud
  - 400.2.2.5                      Koordinasi dan Singkronisasi PUG
  
- 400.2.3                      Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
  - 400.2.3.1                      Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
  - 400.2.3.2                      Data perlindungan perempuan
  - 400.2.3.3                      Advokasi dan fasilitasi
  - 400.2.3.4                      Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
  - 400.2.3.5                      Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
  - 400.2.3.6                      Analisis dan penyajian informasi gender
  - 400.2.3.7                      Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
  - 400.2.3.8                      Pengaduan Masyarakat Korban Kekerasan Perempuan
  - 400.2.3.9                      Rujukan Korban Kekerasan perempuan
  
- 400.2.4                      Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
  - 400.2.4.1                      Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
  - 400.2.4.2                      Data perlindungan anak
  - 400.2.4.3                      Advokasi dan fasilitasi
  - 400.2.4.4                      Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
  - 400.2.4.5                      Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
  - 400.2.4.6                      Pengaduan Masyarakat Korban Kekerasan Terhadap Anak



400.2.5	400.2.4.7	Rujukan Korban Kekerasan Terhadap Anak
	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	
400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	
400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	
<b>400.3</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	
400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak
	400.3.2.4	Block Grant
400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)

	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi

400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
400.3.10.3	Sertifikasi Guru
	400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.7 Block grant
	400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan
400.3.11.1	Penilaian Akademik
400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
400.3.13.2	Sarana Pendidikan
400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
<b>400.4</b>	<b>KEOLAHRAGAAN</b>
400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal (antara lain: Bimtek, Seminar, Pelatihan Pelatih, Pelatihan Wasit/Juri, Pelatihan Instruktur)
400.4.2.4	Penyelenggaraan Kompetisi (antara lain: TOR, SK Panitia, Pemanggilan Peserta, Laporan )
400.4.2.5	Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Aplikasi Seport Development Index (SDI) (antara lain: TOR, SK Panitia, Surat Menyurat, Laporan)
400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi
400.4.3.1	Olahraga Massal

	400.4.3.2	Olahraga Tradisional
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi
	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional
	400.4.5.2	Layanan Khusus
400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
	400.4.7.2	Kompetisi
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga
400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
	400.4.9.1	Industri Olahraga
	400.4.9.2	Promosi Olahraga
400.4.10	Olahraga Prestasi	
	400.4.10.1	Daerah
	400.4.10.2	Nasional
	400.4.10.3	Internasional
400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
	400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
	400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
	400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga

#### **400.5 KEPEMUDAAN**

400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda



	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
	400.5.2.3	Pengembangan
400.5.3		Peningkatan Wawasan Pemuda
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
400.5.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
	400.5.5.1	Pengkajian
	400.5.5.2	Pengembangan
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
	400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan (Pelatihan Kepemimpinan Pemuda)
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan (antara lain : Pelatihan dan Pengkaderan Kesukarelawanan Pemuda )
	400.5.6.3	Paskibraka (antara lain : KAK, Pemberitahuan terkait dengan penyeleksian dan pelatihan, Pelaksanaan Monev, Pelaporan )
400.5.7		Kewirausahaan
	400.5.7.1	Kelembagaan (antara lain Seleksi WMP Berprestasi dan Penggerak WMP Berprestasi)

	400.5.7.2	Pengaderan (antara lain pelatihan kewirausahaan pemula, peningkatan dan pengembangan kapasitas wirausaha muda)
	400.5.7.3	Perintisan (antara lain : Fasilitasi Kemitraan Usaha Pemuda)
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
	400.5.8.5	Hari Sumpah Pemuda
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
<b>400.6</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
	400.6.2.1	Registrasi Nasional
	400.6.2.2	Pelindungan
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya	
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan nilai

	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
	400.6.5.2	Kekayaan budaya
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
	400.6.5.4	Diplomasi budaya
<b>400.7</b>	<b>KESEHATAN</b>	
400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.7.1.1	Penyelenggaraan komite medik
	400.7.1.2	Rekomendasi audit medis dan pelanggaran etika profesi
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar	
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembiayaan darah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan	
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan

	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
	400.7.4.6	Peraturan internal staf keperawatan
	400.7.4.7	Rekomendasi Kewenangan Klinis
	400.7.4.8	Surat Penugasan Klinis
	400.7.4.9	Rincian kewenangan klinis
	400.7.4.10	Rekomendasi pemulihan Kewenangan Klinis
	400.7.4.11	Rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis
	400.7.4.12	Rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan
	400.7.4.13	Rekomendasi pendidikan keperawatan
	400.7.4.14	Panduan (Panduan Asuhan Keperawatan, Panduan Kredensial Keperawatan, Panduan Etik Keperawatan).
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilologi
	400.7.5.3	Radiologi

400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.5.8	Surat Permintaan Bahan Habis Pakai untuk pemeriksaan TCM GenXpert TB
400.7.5.9	Surat Pengiriman Sampel Malaria
400.7.5.10	Surat Pengantar Pemberitahuan Penyelesaian Pemeriksaan TCM GenXpert TB
400.7.5.11	Surat permintaan Bahan Habis Pakai atau Reagen (Rapid Antigen) VTM, Masker N95, Anti HCV,HIV, Dan lain-lain)
400.7.5.12	Surat Pengantar Pemberitahuan Penyelesaian Pemeriksaan HIV Viral Load
400.7.5.13	Surat pengiriman sampel SGTF
400.7.5.14	Surat pengiriman sampel EID (Early Infant Diagnosis (Dikrim Ke RSUD Dr.Sutomo)
400.7.5.15	Surat permintaan Bahan Habis Pakai ke KEMENKES RI
400.7.5.16	Surat Penambahan atau Up grade Alat ke PT yg bekerjasama dengan Lab (KSO Alat)
400.7.5.17	Surat Permintaan Uji Fungsi dan Kesesuaian Alat Kesehatan
400.7.5.18	Surat Berita Acara Kerusakan Alat Kesehatan
400.7.5.19	Surat Telaah Permintaan Kalibrasi Alat Kesehatan
400.7.5.20	Surat permintaan barang dan spare part alat kesehatan
400.7.5.21	Surat hasil report pemeriksaan alat kesehetan
400.7.5.22	Surat bukti penyerahan barang alat kesehatan dari rekanan pihak ke-3
400.7.5.23	Surat permintaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kesehatan ke rekanan pihak ke-3
400.7.5.24	Surat berita acara kerusakan barang ke Instalasi terkait
400.7.5.25	Surat permintaan pengadaan barang fasilitas sarana dan prasarana
400.7.5.26	Pengelolaan pelayanan radiologi



	400.7.5.27	Pengelolaan bahan habis pakai radiologi
	400.7.5.28	Pengelolaan pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan serta kebutuhan staf)
	400.7.5.29	Pengelolaan laporan dan evaluasi pelayanan radiologi
	400.7.5.30	Pengelolaan perizinan dan sertifikasi alat radiologi
	400.7.5.31	Pengelolaan peralatan dan maintenance alat radiologi
	400.7.5.32	Pengelolaan proteksi radiasi radiologi
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia

400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang
400.7.9.1	Pengendalian malaria
400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular
400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
400.7.10.3	Penyakit kanker
400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan
400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.11.6	Penyelenggaraan Penyehatan Tanah
400.7.11.7	Penyelenggaraan Penyehatan Sarana dan Bangunan
400.7.11.8	Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
400.7.11.9	Penyelenggaraan Pengawasan Linen (Laundry)
400.7.11.10	Penyelenggaraan Pengawasan Proses Dekontaminasi Melalui Disinfeksi dan Sterilisasi
400.7.11.11	Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Konstruksi/Renovasi Bangunan dan Rumah Sakit
400.7.11.12	Penyelenggaraan Pengawasan Rumah Sakit Ramah Lingkungan
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
400.7.13	Gizi
400.7.13.1	Gizi makro
400.7.13.2	Gizi mikro
400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik

	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik

	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
	400.7.20.5	Komite farmasi dan terapi
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
	400.7.22.3	Surat visum korban hidup
	400.7.22.4	Surat visum jenazah
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi

	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
	400.7.23.6	Pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja
	400.7.23.7	Pencegahan, pengendalian dan penanganan PAK dan KAK
	400.7.23.8	Pengembangan progra penanganan B3 dan limbah
	400.7.23.9	Pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan kerja dan sarana prasarana
	400.7.23.10	Pengelolaan sistem utilitas
	400.7.23.11	Pengembangan manajemen tanggapan darurat bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia



400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

- 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
- 400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
- 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
- 400.7.30.4 Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
- 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya

400.7.31 Rekam Medis

#### **400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.8.2 Fasilitasi

- 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
- 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
- 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
- 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
- 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan

400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME

- 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
- 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
- 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
- 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
- 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

#### **400.9 SOSIAL**

400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak

- 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
- 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
- 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
- 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
- 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus

400.9.3 Rehabilitasi Sosial

- 400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental

- 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social

	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi

	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
	400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
	400.9.14.5	Bantuan Langsung
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
	400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
	400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
	400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
	400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan

#### **400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.1 Fasilitas Pengembangan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.3 Fasilitas Permusyawaratan Desa
	400.10.2.4 Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
	400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
	400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
	400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
	400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
	400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
	400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
	400.10.4.1 Budaya Nusantara
	400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
	400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
	400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat
	400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
	400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
	400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
	400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
	400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
	400.10.6.1 Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
	400.10.6.2 Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
	400.10.6.3 Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan
	400.10.6.4 Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
	400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

#### **400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**

400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.11.2	Pertamanan
	400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan

	400.11.2.2	Taman Kota
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
400.11.3	Pemakaman	
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
	400.11.3.2	Pemakaman
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
400.11.4	Jalur Hijau	
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
400.11.5	Peran Serta Masyarakat	
400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	
400.11.7	Pengelolaan Data	
400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	

## **400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	
400.12.2	Pendaftaran Penduduk	
	400.12.2.1	Identitas Penduduk
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3	Pencatatan Sipil	
	400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
	400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
	400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
	400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
400.12.5.2	Kualitas Penduduk
400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6	Penyerasian Kependudukan
400.12.6.1	Indikator Kependudukan
400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

#### **400.13      KELUARGA BERENCANA**

400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk
400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk



	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
400.13.7	Pengembangan Sistem	
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8	Pengembangan Materi	
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10	Analisis Sosial	
400.13.11	Analisis Ekonomi	
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	
400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	
400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	

400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria
400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
400.13.26	Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
400.13.28	Pelembagaan bina ketahanan remaja
400.13.28.1	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja

	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
400.13.30		Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
400.13.31		Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33		Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
400.13.34		Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
400.13.35		Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.36		Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
400.13.37		Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38		Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.2	Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39		Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40		Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

	400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.41		Advokasi dan pencitraan
400.13.42		Komunikasi, Informasi dan Edukasi
	400.13.42.1	Promosi
	400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
	400.13.42.3	Produk media komunikasi
400.13.43		Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
400.13.44		Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.45		Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.46		Tenaga Lini Lapangan
	400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
	400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
400.13.47		Institusi Masyarakat Pedesaan
	400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
	400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
400.13.48		Mekanisme Operasional lini lapangan
	400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
400.13.49		Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan

	400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	
400.13.51	Analisis dan evaluasi	
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
	400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data	
	400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
	400.13.52.2	Pengelolaan bank data
400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi	
	400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	
	400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
	400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
<b>400.14</b>	<b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	
400.14.1	Keprotokolan	
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	
400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	
400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	

	400.14.4.1	Kliping koran
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
	400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
	400.14.5.5	Forum Kehumasan
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	
400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	
400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	
400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	
400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	
400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	
400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	

## 500 PEREKONOMIAN

### 500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	
500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
	500.1.2.2	Akses Pangan
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan
500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan	
	500.1.3.1	Distribusi Pangan
	500.1.3.2	Harga Pangan
	500.1.3.3	Cadangan Pangan
500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan	
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan



	500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan
500.1.6		Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7		Bimbingan Teknis
500.1.8		Evaluasi

## **500.2 PERDAGANGAN**

500.2.1		Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.2.2		Perdagangan Dalam Negeri
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdagangan
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku Pasar
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa

	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
500.2.4		Perdagangan Berjangka Komoditi
	500.2.4.1	Pengkajian pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem informasi
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
500.2.5		Bimbingan Teknis
500.2.6		Evaluasi

### **500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

500.3.1		Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.3.2		Kelembagaan Koperasi dan UKM
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.2.5	Penyuluhan Koperasi
	500.3.2.6	Konsultan/PLUT
	500.3.2.7	Pengawasan Koperasi
500.3.3		Produksi
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan

500.3.3	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan	
500.3.4	500.3.4.1	Program Pendanaan
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
	500.3.4.3	Urusan Permodalan
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
500.3.5	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
500.3.6	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
	500.3.6.5	Advokasi
	500.3.6.6	Pengembangan Usaha Mikro
	500.3.6.7	Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
	500.3.6.8	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
500.3.7	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
	500.3.7.6	Pameran
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
500.3.8	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
	500.3.8.2	Penelitian UKM
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
500.3.9.1	Koordinasi dan Konsultasi
500.3.9.2	Perjanjian Kerjasama
500.3.9.3	Nota Kesepahaman (MoU)
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi
500.3.12	Laporan

#### **500.4 KEHUTANAN**

500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.4.2	Penyuluhan
500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
500.4.2.2	Materi Penyuluhan
500.4.2.3	Program Penyuluhan
500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
500.4.2.8	Deseminasi
500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
500.4.3	Planologi Kehutanan
500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

500.4.4	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
	Bina Usaha Kehutanan	
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam

	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan

	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
<b>500.5</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.5.2	Perikanan Tangkap
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan



	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.17	Fasilitas Perizinan (antara lain: Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan/SKP)
	500.5.2.18	TPI/PPI
	500.5.2.19	Kesyahbandaran
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
	500.5.3.17	Residu Ikan
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk

	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
	500.5.4.25	Rekomendasi Kelayakan Pengolahan
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil

	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.5.6.21	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan

500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
500.5.7.11	Pemasukan Formulir
500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
500.5.7.14	Surat Perintah
500.5.7.15	Rekomendasi
500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
500.5.7.21	Lokasi Karantina

<b>500.6</b>	<b>PERTANIAN</b>	
500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.6.2	Perlindungan hortikultura	
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3	Perbenihan Hortikultura (Budidaya dan Pascapanen)	
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.3.4	Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah
	500.6.3.5	Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Sayur dan Tanaman Obat
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.4.6	Jalan Usaha Tani
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerjasama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
	500.6.11.5	Gudang Benih
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
	500.6.12.5	Sosialisasi DPI Pangan
	500.6.12.6	Gerdal OPT Pangan
	500.6.12.7	Sosialisasi OPT Pangan
	500.6.12.8	Gerdal DPI Pangan
	500.6.12.9	Gerdal OPT Hortikultura
	500.6.12.10	Klinik PHT
	500.6.12.11	Penerapan PHT
	500.6.12.12	DPI Hortikultura
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	

	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Hortikultura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standarisasi	
	500.6.15.1	Standarisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
	500.6.15.5	Sertifikasi Tanaman Pangan
	500.6.15.6	Sertifikasi Tanaman Hortikultura
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik	
	500.6.17.1	Informasi Pasar
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)	
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	



500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
500.6.26.1	Hak Cipta
500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
500.6.26.3	Hak Paten Biasa
500.6.26.4	Hak Merek
500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian
500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28	Pelayanan Hukum
500.6.28.1	Sertifikasi
500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29	Karantina Pertanian
500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30	Bimbingan Teknis
500.6.31	Evaluasi
500.6.32	Penyuluhan Pertanian
500.6.32.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
500.6.32.2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta
500.6.32.3	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
500.6.32.4	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
500.6.32.5	Korporasi Petani
500.6.32.8	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani
500.6.33	Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
500.6.33.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
500.6.33.2	Materi Diklat

	500.6.33.5	Panduan fasilitator
	500.6.33.6	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Diklat
500.6.34	Penyelenggaraan Diklat Pertanian	
	500.6.34.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
	500.6.34.2	Sistem Informasi dan bahan ajar diklat
	500.6.34.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

<b>500.7</b>	<b>PETERNAKAN</b>	
500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	
500.7.2.2	Pakan Ternak	
500.7.2.3	Budidaya Ternak	
500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)	
500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	
500.7.3	Bimbingn Teknis	
500.7.4	Evaluasi	
500.7.5	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	
500.7.5.1	Data dan Informasi Peternakan (Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Peternakan	
500.7.5.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha Peternakan	
<b>500.8</b>	<b>PERKEBUNAN</b>	
500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.8.2	Tanaman Semusim	
500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	
500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	
500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	
500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	
500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar	
500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	
500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	
500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	

500.8.4	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
	Tanaman Tahunan	
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
500.8.5	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	Perlindungan Perkebunan	
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
500.8.6	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
500.8.7	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.8	Bimbingan Teknis Perkebunan	
	Evaluasi Perkebunan	

**500.9 PERINDUSTRIAN**

500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2	Iklim Usaha dan Kerjasama
	500.9.2.1 Industri Manufaktur
	500.9.2.2 Industri Agro
	500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Industri
	500.9.3.1 Industri Manufaktur
	500.9.3.2 Promosi Industri Agro
	500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
	500.9.3.5 Pameran
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi
	500.9.4.1 Industri Manufaktur
	500.9.4.2 Industri Agro
	500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual
	500.9.5.1 Industri Manufaktur
	500.9.5.2 Industri Agro
	500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau
	500.9.6.1 Industri Manufaktur
	500.9.6.2 Industri Agro
	500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
	500.9.8.1 Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
	500.9.9.1 Rencana Pembangunan Industri Provinsi

	500.9.9.2	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	500.9.9.3	Kawasan Ekonomi Khusus
	500.9.9.4	Sentra IKM
	500.9.9.5	Kawasan Peruntukan Industri
	500.9.9.6	Kawasan Industri
500.9.10		Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
500.9.11		Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
500.9.12		Standarisasi
	500.9.12.1	Standar
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13		Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
	500.9.13.1	Kebijakan Industri
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
	500.9.13.4	Izin Usaha Industri
500.9.14		Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
	500.9.14.1	Industri Hijau
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup
	500.9.14.3	Energi
500.9.15		Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
500.9.17		Fasilitasi Pengembangan Industri Kerajinan Khas Daerah
	500.9.17.1	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)
500.9.18		Koordinasi
500.9.19		Informasi Industri
	500.9.19.1	Data
	500.9.19.2	SIINas
500.9.20		Sumber Daya Industri
	500.9.20.1	Sumber Daya Alam
	500.9.20.2	Sumber Daya Manusia

	500.9.20.3	Sarana dan Prasarana Industri
500.9.21	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
500.9.22	Laporan	

## **500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.2.3	Pertambangan
	500.10.2.4	Panas Bumi
	500.10.2.5	Geosains
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
500.10.3	Penelitian Kegeologian	
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi
500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi

500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
500.10.7.7	Partisipasi Interest
500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi



	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)

	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)
500.10.10	500.10.9.10	Usaha penunjang
	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi

	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca

	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)

500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi
500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan
500.10.22	Standarisasi Kompetensi
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
	500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
	500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara

	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan

	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)
500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)
500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)
500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)
500.10.29.17	Pengawasan Teknis
500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan
500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan



	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	

	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
	500.10.36.1	Energi baru terbarukan
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

## **500.11 PERHUBUNGAN**

500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.11.1.1	Rekomendasi Izin Rencana Induk Pelabuhan Provinsi (RIPP) dan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr)/Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKp)
	500.11.1.2	Rekomendasi Izin Pelabuhan Ship to Ship (STS)
	500.11.1.3	Rekomendasi Izin Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Khusus Kepentingan Sendiri (TUKS)
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama

	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi

	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan

	500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
	500.11.15.3	Standar pelayanan minimal (SKM) kapal sungai, danau dan penyeberangan
500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
	500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	

	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24	Angkutan Perkotaan	
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25	Pemadu Moda Transportasi Perkotaan	
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
	500.11.25.2	Pemadu moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.33	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
	Parkir	
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
500.11.34	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
	Lingkungan Perhubungan	
	500.11.34.1	Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Terminal, Pelabuhan dan Bandara
500.11.35	Perkeretaapian	
	500.11.35.1	Pintu lintas kereta api
	500.11.35.2	Signal/tanda rambu perkeretaapian
	500.11.35.3	Perizinan perkeretaapian
	500.11.35.4	Sarana dan prasarana meliputi lokomotif, gerbong, bogie (jalan/jembatan) perkeretaapian
	500.11.35.5	Trayek perkeretaapian
	500.11.35.6	Angkutan Penumpang, angkutan barang perkeretaapian
	500.11.35.7	Keselamatan Perkeretaapian
	500.11.35.8	Kecelakaan perkeretaapian
	500.11.35.9	Perawatan/perbaikan perkeretaapian

## **500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.12.2	Telekomunikasi	
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran	
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	



	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	e- Government	
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat

500.12.13	Pengelolaan Media Publik
	500.12.13.1 Media Cetak
	500.12.13.2 Media Online
	500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi
	500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika
	500.12.15.1 Jaringan
	500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3 Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data
	500.12.16.1 Portal dan Konten
	500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
500.12.17	Pusat Kerjasama
	500.12.17.1 Kerja Sama daerah
	500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
	500.12.18.1 Pelayanan Informasi
	500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
	500.12.18.3 Bimbingan Teknis
	500.12.18.4 Pers/Media/Massa
	500.12.18.5 Pameran
	500.12.18.6 Sosialisasi
500.12.19	Evaluasi
500.12.20	Publikasi
	500.12.20.1 Penerbitan
	500.12.20.2 Dokumentasi
500.12.21	Pengembangan Sumber Daya Manusia
	500.12.21.1 Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
500.12.22	Perumusan Kebijakan Bidang Statistik
	500.12.22.1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	500.12.22.2 Penyiapan Kebijakan
	500.12.22.3 Masukkan dan Dukungan dalam Penyusunan
	500.12.22.4 Pengembangan Desain dan Standarisasi

500.12.23	500.12.22.5	Penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NPSK)
	Sensus dan Survei Sektoral	
	500.12.23.1	Perencanaan
	500.12.23.2	Persiapan
	500.12.23.3	Pelatihan
	500.12.23.4	Pelaksanaan Lapangan
	500.12.23.5	Pengolahan
	500.12.23.6	Analisis Dan Penyajian Hasil Sensus
500.12.24	500.12.23.7	Diseminasi Hasil Sensus
	Evaluasi dan Pelaporan Survei dan Konsolidasi Data	
	500.12.24.1	<i>One Data One Map</i>
<b>500.13</b>	<b>PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	
500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata (antara lain: Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Kawasan Pariwisata, Kawasan Strategis)
	500.13.2.3	Industri Pariwisata (antara lain: Pembinaan/Pengawasan Usaha Pariwisata, Investasi Pariwisata, Fasilitas/Standarisasi)
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (antara lain: Kelompok Sadar Wisata)
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (antara lain: Tourism Information Centre)
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri (antara lain: Pameran Luar Negeri, Event Promosi, Foto/Video)
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri (antara lain: Pameran Dalam Negeri, Event Promosi, Duta wisata/Putri Pariwisata, Foto/Video)
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
	500.13.3.5	Promosi dan informasi Potensi dan peluang investasi daerah
	500.13.3.6	Promosi dan informasi Potensi wisata dan budaya
	500.13.3.7	Promosi dan informasi tentang IKN

500.13.4	500.13.3.8	Promosi dan informasi tentang Mess Kaltim di Jakarta
	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
	500.13.4.4	Pengelolaan Anjungan TMII
	500.13.4.5	Pengembangan Anjungan TMII
	500.13.4.6	Peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan seni budaya
500.13.5	500.13.4.7	Kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya
	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK	
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi (antara lain: Sarana & Prasarana Ekonomi Kreatif)
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif (antara lain: Kemitraan SDM Parekraf, SDM Usaha Pariwisata, SDM Ekonomi Kreatif)
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif (antara lain: Pramuwisata)
500.14	STATISTIK	
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
	500.14.2.1	Perencanaan

	500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Uji coba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)
	500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner ), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data

	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	
<b>500.15</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	
500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan

500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja
	500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3 Bursa Kerja
	500.15.8.4 Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
	500.15.9.1 Antar Kerja
	500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
	500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi
	500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
	500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2 Perjanjian Kerja
	500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
	500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.14.1 Pengupahan
	500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
	500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18		Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19		Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
500.15.20		Bina Penegakan Hukum
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21		Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K3



	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
<b>500.16</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektoral

	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal	
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
<b>500.17</b>	<b>PERTANAHAN</b>	
500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan	
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
500.17.4	Sengketa Tanah	

- 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
- 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

## **500.18 TRANSMIGRASI**

- 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
  - 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
  - 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
  - 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
  - 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
- 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
  - 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
  - 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
  - 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
  - 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
- 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
  - 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
  - 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
  - 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
  - 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
- 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
  - 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
  - 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
  - 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
  - 500.18.5.4 Pelayanan Investasi
- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
  - 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
  - 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
  - 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
  - 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat

	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8		Pengembangan Usaha
	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9		Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10		Penyerasian Lingkungan
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	
600.1	PEKERJAAN UMUM	
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air

	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
	600.1.2.2	Kelembagaan
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3		Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.3.2	Manajemen Mutu
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
600.1.4		Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5		Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	-
600.1.6		-
600.1.7		Pengembangan Jaringan Jalan
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8		Pembangunan Jalan
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9		Preservasi Jalan
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman

	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10		Pengelolaan Jembatan
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
	600.1.11.4	Konektifitas jaringan jalan pusat dan daerah
600.1.12		Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol
600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan

	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
	600.1.17.5	Kelembagaan
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	

## **600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
	600.2.2.3	Kemitraan
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan	
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan	
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2	Analisa Teknik
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	

	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7		Penyediaan Rumah Khusus
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9		Investasi Infrastruktur
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas



600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2	Pengembangan Materi
600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.16.1	Antar Sektor
600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi

**600.3****TATA RUANG (TATA KOTA)**

600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2	Perencanaan
600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian

	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.4	Pemetaan	
	600.3.4.1	Peta Dasar
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
<b>600.4</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
	600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
600.4.5	Dampak Lingkungan	
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak

600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan
600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.8.1	Pengembangan
600.4.8.2	Pemanfaatan
600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
600.4.8.4	Keamanan Hayati
600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
600.4.10.1	Perangkat mitigasi
600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim
600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)
600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
600.4.14.1	Pemantauan
600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi

600.4.15	Pengelolaan Sampah
	600.4.15.1 Pembatasan sampah
	600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan
	600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan
	600.4.18.1 Penyidikan
	600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi Lingkungan
	600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat
	600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat
	600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
	600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat

600.4.23	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
	Data dan Informasi Lingkungan	
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
600.4.24	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
	Kelembagaan Lingkungan	
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
600.4.25	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
	Standarisasi dan teknologi	
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian

## **700 PENGAWASAN**

### **700.1 PENGAWASAN INTERNAL**

700.1.1	Rencana Pengawasan	
	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan	
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)

700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>

## **800 KEPEGAWAIAN**

### **800.1 SUMBER DAYA MANUSIA**

800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)
800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)
800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)
800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)
800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN

	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)
800.1.7		Bantuan Hukum
800.1.8		Status dan Kedudukan Pegawai
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9		Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10		Pengawasan dan pengendalian
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11		Administrasi Pegawai
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan



800.1.12	Kesejahteraan Pegawai
800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
800.1.12.3	Tabungan Perumahan
800.1.12.4	Bantuan Sosial
800.1.12.5	Pakaian Dinas
800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan
800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
800.1.13.4	Sekretaris Daerah
800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi
800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
<b>800.2</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>
800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan
800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
800.2.2.4	Modul-modul diklat
800.2.2.5	Panduan fasilitator
800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800.2.3	Widyaiswara
800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara

	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
800.2.5	Alumni	

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)	
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
	900.1.1.2	Penyusunan
	900.1.1.3	Penyampaia
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
	900.1.1.5	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	900.1.1.6	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran	
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah

	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Negara Donor)
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah

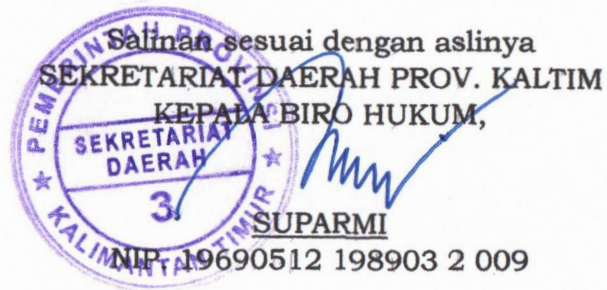
	900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah
900.1.12.1	Anggaran Daerah
900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah

900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)
900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)
900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)
900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan
900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)

900.1.14.2		Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)
900.1.14.3		Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)
900.1.14.4		Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)
900.1.14.5		Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
900.1.15.1		Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.2		Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)

- 900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
- 900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
- 900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



JADWAL RETENSI ARSIP

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
I	000	UMUM				
1	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
		000.1.1	Telekomunikasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
		000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri			
		000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)	1 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali Notula terkait Kebijakan
		000.1.6	Penyediaan Konsumsi	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas			
		000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor			
		000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.8.2	Penghijauan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.8.3	Perbaikan Gedung	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer			
		000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.9.2	Pemasangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.10	Ketertiban dan Keamanan			
		000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	1 tahun	1 tahun	Musnah
		000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	1 tahun	1 tahun	Musnah
2	000.2	PERLENGKAPAN				
		000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan			
		000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	2 tahun setelah pemutakhiran data	3 tahun	Musnah
		000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor			Musnah
		000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	2 tahun setelah pemutakhiran data	3 tahun	Musnah
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	2 tahun	3 tahun	Musnah
		000.2.3	Distribusi			Musnah
		000.2.3.1	Barang habis pakai	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	000.2.3.2	Barang milik daerah	2 tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan	3 tahun	Musnah
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk di dalamnya proses lelang penghapusan)	3 tahun setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
3	000.3	PENGADAAN			
	000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)	2 tahun setelah pemutakhiran data	3 tahun	Permanen
	000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.3.7	Pembinaan dan Advokasi (antara lain: Advokasi, Kelembagaan, dan SDM)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	000.4	PERPUSTAKAAN			
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan	3 tahun	Permanen
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka			
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.3	Koleksi Pustaka			
	000.4.3.1	Pembelian	3 tahun	7 tahun	Musnah
	000.4.3.2	Hibah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.3.3	Hadiah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.4.3.4	Tukar Menukar	1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.3.6	Terbitan Internal	1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	1 tahun	1 tahun	Permanen
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.6	Layanan Perpustakaan			
	000.4.6.1	Keanggotaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.4.6.2	Peminjaman	1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.4	Pengembalian	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.5	Perpustakaan Keliling (Pusling) dalam kota	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.6	Perpustakaan Keliling (Pusling) luar kota/pelosok kota	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	000.4.6.7	Go-Book	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.8	Laper Sesaat	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.9	Inovasi Layanan	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.10	Buncu Baca Indoor	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.11	Buncu Baca Outdoor	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.12	Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Offline	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.6.13	Pengelolaan Kotak Saran Offline	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.7	Kerjasama Perpustakaan			
	000.4.7.1	Memorandum of Understanding (MoU)	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			
	000.4.8.1	Pengembangan situs web	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.8.5	Pengembangan aplikasi iKaltim	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.8.6	Pengembangan web. Pustaka Borneo	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.8.7	Pengembangan SMS Reminder	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.8.8	Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Online	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.8.9	Pengelolaan Kotak Saran Online	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
	000.4.9.1	Data Layanan Perpustakaan SMA/SMK		2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9.2	Data Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi		2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9.3	Data Layanan Perpustakaan Kota/Kabupaten		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9.4	Data Layanan Perpustakaan Instansi Daerah		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9.5	Data Layanan Perpustakaan BUMN		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9.6	Data Layanan Perpustakaan BUMD		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9.7	Data Layanan Perpustakaan Organisasi Swasta		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9.8	Data Layanan Perpustakaan Perorangan		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.9.9	Data Layanan Pegiat Literasi		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.4.10	Konservasi				
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.12	Transformasi Digital		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.13	Kurasi Digital		2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan				
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.5	Pembudayaan Kegemaran Membaca		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.6	Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca ( GPMB )		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.7	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.8	Kajian Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat (IPLM)		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.9	Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.10	Nomor Pokok Perpustakaan ( NPP )		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.11	Akreditasi Perpustakaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.12	Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.13	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.14	Bantuan / Stimulan Pengembangan Perpustakaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.4.14.15	Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
5	000.5	KEARSIPAN				
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan				
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)		1 tahun	1 tahun	Permanen
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis		1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis (antara lain: Penilaian Arsiparis Terampil dan Penilaian Arsiparis Ahli )		1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)		2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)	3 tahun	7 tahun	Musnah
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali Berkas Penetapan
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	000.5.2.12	Bimbingan Teknis Kearsipan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.2.13	Pengembangan wawasan arsiparis ( antara lain : Sertifikasi Arsiparis dan Uji Kompetensi Arsiparis )	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis			
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)	2 tahun setelah semua arsip dipindahkan	3 tahun	Musnah
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)	2 tahun setelah Daftar Arsip Inaktif Diperbarui	3 tahun	Musnah
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)	1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)	1 tahun	1 tahun	Permanen
	000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)	2 tahun tahun setelah hak dan kewajiban selesai	3 tahun	Permanen
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)	2 tahun tahun setelah hak dan kewajiban selesai	3 tahun	Permanen
	000.5.6	Penyusutan Arsip			
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	1 tahun	1 tahun	Musnah
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)	1 tahun	1 tahun	Permanen
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)	1 tahun	1 tahun	Permanen
	000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang dialihmediakan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis			
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1 tahun setelah data diperbarui (update)	1 tahun	Permanen
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	1 tahun setelah data diperbarui (update)	1 tahun	Permanen
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis			
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)	1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali Penetapan arsip yang diserahkan, Berita Acara Penyerahan Arsip, dan Daftar arsip yang diserahkan
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	1 tahun	1 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)	1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali Hasil Wawancara (Kaset/CD/Media Lain sesuai Perkembangan TI) dan Transkrip
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	1 tahun	1 tahun	Permanen
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)	1 tahun	1 tahun	Permanen
	000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif	1 tahun	1 tahun	Permanen
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber, Pembuatan Citra Daerah, Pameran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip, Wisata Arsip, Siaga Arsip dan Edukasi Kearsipan )	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan /atau dibubarkan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan			
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal (antara lain : PKPKT, Instrumen Pengawasan Kearsipan, Laporan Hasil Pengawasan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali LAKI Permanen
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal (antara lain : PKPKT, Instrumen Pengawasan Kearsipan, Laporan Hasil Pengawasan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali LAKE dan LHPKN Permanen
	000.5.15.3	Sanksi	2 Tahun setelah Keputusan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	000.5.15.4	Pemilihan OPD Terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	000.5.15.5	Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kab / Kota Terbaik Tingkat Provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6	000.6	PERSANDIAN			
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	000.6.2	Pengamanan persandian			
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptو	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptو	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi			
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	000.6.3.3	Pelaksanaan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	000.6.3.4	Pelaporan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian			
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik			
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	1 Tahun	1 tahun	Musnah
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	000.6.5.7	Pelaporan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
7	000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang			
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	3 tahun	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	000.7.1.6	Musrenbang Desa	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah			
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	000.7.2.6	Program kerja tahunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	000.7.2.8	Laporan Berkala	1 tahun	1 Tahun	Musnah
	000.7.2.9	Laporan Insidental	1 tahun	1 Tahun	Permanen
	000.7.2.10	Evaluasi Program	1 tahun	1 Tahun	Permanen
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	1 tahun	1 Tahun	Permanen
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah			
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.6.5	Penerapan perencana aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan			
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	3 tahun	7 Tahun	Permanen
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	3 tahun	7 Tahun	Permanen
8	<b>000.8</b>	<b>ORGANISASI DAN TATA LAKSANA</b>			
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
	000.8.1.1	Pembentukan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.1.2	Pengubahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.1.3	Pembubaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja			
	000.8.2.1	Analisa Jabatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja			
	000.8.3	Ketatalaksanaan			
	000.8.3.1	Proses Bisnis	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.3.2	Standar Pelayanan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.3.4	Pelayanan Publik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi			
	000.8.6.1	Budaya Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Musnah
9	<b>000.9</b>	<b>PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN</b>			
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	000.9.6.1	Data		2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.9.6.2	Statistik		2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian		2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.9.11	Invensi				
	000.9.11.1	Invensi Produk		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.9.11.2	Invensi Proses		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.9.11.3	HKI Invensi		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.9.12	Inovasi				
	000.9.12.1	Inovasi Produk		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.9.12.2	Inovasi Produk Layanan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.9.12.3	Inovasi Proses		2 tahun	3 tahun	Musnah
	000.9.12.4	HKI Inovasi		2 tahun	3 tahun	Musnah
II	100	PEMERINTAHAN				
1	100.1	OTONOMI DAERAH				
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				
	100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	100.1.4.5	Assosiasi Daerah		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi )				
	100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	100.2	PEMERINTAHAN UMUM				
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama				
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.2.6	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.2.7	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.2.8	Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeer		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.2.9	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah		5 tahun	5 Tahun	Permanen
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara		5 tahun	5 Tahun	Permanen
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah		5 tahun	5 Tahun	Permanen
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan		5 tahun	5 Tahun	Permanen



NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
3	100.3	HUKUM			
	100.3.1	Program Legislasi			
		100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
		100.3.1.2 Program Legislasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	2 tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah			
		100.3.3.1 Keputusan/Ketetapan Gubernur	2 tahun	3 tahun	Permanen
		100.3.3.2 Keputusan/Ketetapan Bupati	2 tahun	3 tahun	Permanen
		100.3.3.3 Keputusan/Ketetapan Walikota	2 tahun	3 tahun	Permanen
		100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	2 tahun	3 tahun	Musnah
		100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota	2 tahun	3 tahun	Musnah
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran			
		100.3.4.1 Instruksi/Surat Edaran Provinsi	2 tahun	3 tahun	Permanen
		100.3.4.2 Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	2 tahun	3 tahun	Permanen
		100.3.4.3 Instruksi/Surat Edaran Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
		100.3.4.4 Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	2 tahun	3 tahun	Musnah
	100.3.5	Surat Perintah			
		100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur	2 tahun	3 tahun	Musnah
		100.3.5.2 Surat Perintah Bupati	2 tahun	3 tahun	Musnah
		100.3.5.3 Surat Perintah Walikota	2 tahun	3 tahun	Musnah
		100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II	2 tahun	3 tahun	Musnah
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	2 tahun	3 tahun	Permanen
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama			
		100.3.7.1 Dalam Negeri	2 tahun setelah kerjasama berakhir dankewajiban para pihak telah dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		100.3.7.2 Luar Negeri	2 tahun setelah kerjasama berakhir dankewajiban para pihak telah dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Sampai dengan tidak berlaku	1 Tahun	Simpan di perpustakaan
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	2 Tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum			
		100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
		100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
		100.3.11.3 Tata Usaha Negara	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
		100.3.11.4 Perburuhan	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
		100.3.11.5 Arbitrase	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
	100.3.11.6	Sengketa Adat		2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
	100.3.12	Perijinan		2 tahun setelah ijin diperbarui	3 tahun	Permanen
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
	100.3.13.1	Hak Cipta		2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	100.3.13.2	Hak Paten		2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	100.3.13.3	Hak Desain Industri		2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang		2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	100.3.13.5	Hak Merk		2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
	100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak		1 tahun Setelah ditolak	1 tahun	Musnah
III	200	POLITIK				
1	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara (antara lain: Duta Pancasila, Paskibraka)		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.2.3	Bela Negara		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.2.6	Gerakan Nasional Revolusi Mental (antara lain: Karakter Bangsa)		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.3	Kewaspadaan Nasional				
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan				
	200.1.4.1	Ketahanan Seni		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.6	Fasilitasi		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas		2 tahun	3 Tahun	Permanen
	200.1.5	Politik Dalam Negeri				
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik (antara lain: TP3D, Pokja IDI, Aplikasi SIPPDEH dengan Kab/Kota sosial,		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.5.7	Database Parpol		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.5.9	Pemilihan Umum		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi				
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat		2 tahun	3 Tahun	Musnah
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi		2 tahun	3 Tahun	Musnah
2	200.2	PEMILU				

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih			
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu			
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.5	Pencalonan Pemilu			
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.5.3	Daftar bakal calon	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.6	Kampanye Pemilu			
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.7	Dana Kampanye			
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara			
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.8.2	Master surat suara	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	Sejak pemungutan suara s.d Pengucapan Sumpah/Janji	1 Bulan setelah Pengucapan Sumpah/Janji	Musnah
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Sejak pemungutan suara s.d Pengucapan Sumpah/Janji	1 Bulan setelah Pengucapan Sumpah/Janji	Musnah
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	2 tahun	3 tahun	Musnah
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
IV	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
1	300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja			
	300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja (antara lain: Operasional dan Pengendalian, Pengamanan pengawalan protokol)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
	300.1.5.1	Surat Perintah Penyidikan dan Penyidikan (Sprindik)	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	300.1.5.2	Surat Perintah Penahanan.	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	300.1.5.3	Surat Permintaan.	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	300.1.5.4	Surat Pemberitahuan.	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	300.1.5.5	Berita Acara.	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	2 tahun	3 Tahun	Musnah
2	300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN			
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan			
	300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	2 tahun	3 Tahun	Musnah (kecuali laporan)
	300.2.2.6	Registrasi BEACON	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan			
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.8	Operasi Komunikasi			
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.8.3	Registrasi BEACON	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi			
	300.2.12.1	Laporan Harian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.12.2	Laporan Bulanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	300.2.12.3	Laporoan Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	300.2.12.4	Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
V	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya			
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur			
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
		400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha				
		400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.1.1	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya				
		400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.5.5	Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	3 tahun	7 tahun	Musnah
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus				
		400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	3 tahun	7 tahun	Musnah
		400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	3 tahun	7 tahun	Musnah
		400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	3 tahun	7 tahun	Musnah
		400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	3 tahun	7 tahun	Musnah
		400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	3 tahun	7 tahun	Musnah
		400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	3 tahun	7 tahun	Musnah
		400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi	3 tahun	7 tahun	Musnah
2	400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
		400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum			
		400.2.2.1	Data gender	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
		400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.2.2.3	Monitoring, Evaluasi, Analisis dan Pendampingan PUG	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
		400.2.2.4	Sosialisasi PUG Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosbud	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.2.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi PUG	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)				
		400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 tahun	Permanen
		400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.2.3.8	Pengaduan Masyarakat Korban Kekerasan Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.2.3.9	Rujukan Korban Kekerasan perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)			
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
	400.2.4.2	Data perlindungan anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.2.4.6	Pengaduan Masyarakat Korban Kekerasan Terhadap Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.2.4.7	Rujukan Korban Kekerasan Terhadap Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)			
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
3	400.3	PENDIDIKAN			
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal			
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.2.4	Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat			
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.3.3	Pembinaan Program	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.3.5	Pameran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.3.6	Rakor	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.3.7	Sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama			
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.5.2	Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus			
	400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.6.2	Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.3.6.3	Lomba, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.6.5	Pendataan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.6.6	Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik			

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
		400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.7.3	Sertifikasi Guru	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.7.7	Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.3.8		Sekolah Menengah Atas			
		400.3.8.1	Kurikulum	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.8.2	Bahan Ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.8.3	Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.8.4	Block grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.8.8	Bantuan siswa miskin	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.9		Pendidikan Khusus-Layanan Khusus			
		400.3.9.1	Bahan ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.9.2	Petunjuk Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.9.3	Block grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.9.8	Pendataan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.10		Pendidik dan Tenaga Pendidik			
		400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.10.3	Setifikasi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.3.10.7	Block grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.3.11		Penilaian Pendidikan			
		400.3.11.1	Penilaian Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan			
		400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan			
		400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		400.3.13.2	Sarana Pendidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
4	400.4		KEOLAHRAGAAN			
		400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
		400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan			
		400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal (antara lain: Bimtek, Seminar, Pelatihan Pelatih, Pelatihan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.2.4	Penyelenggaraan Kompetisi (antara lain: TOR, SK Panitia, Pemanggilan Peserta, Laporan )	2 Tahun setelah pelaksanaan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
		400.4.2.5	Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Aplikasi Seport Development Index (SDI) (antara lain: TOR, SK Panitia, Surat Menyurat, Laporan)	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi			

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
		400.4.3.1      Olahraga Massal	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.3.2      Olahraga Tradisional	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.3.3      Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	1 tahun	1 tahun	Musnah
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga			
		400.4.4.1      Olahraga Pendidikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.4.2      Olahraga Rekreasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.4.3      Olahraga Prestasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
		400.4.4.4      Sekolah Khusus Olahraga	1 tahun	1 tahun	Musnah
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
		400.4.5.1      Olahraga Tradisional	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.5.2      Layanan Khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
		400.4.6.1      Kemitraan Keolahragaan	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
		400.4.6.2      Penghargaan Olahraga	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga			
		400.4.7.1      Pembibitan Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.7.2      Kompetisi	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.7.3      IPTEK Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan			
		400.4.8.1      Tenaga Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.8.2      Organisasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga			
		400.4.9.1      Industri Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.9.2      Promosi Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.4.10	Olahraga Prestasi			
		400.4.10.1      Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.10.2      Nasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.10.3      Internasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga			
		400.4.11.1      Standardisasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.11.2      Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.4.11.3      Infrastruktur Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
5	400.5	KEPEMUDAAN			
		400.5.1      Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
		400.5.2      Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda			
		400.5.2.1      Penelusuran (Duta Kepemudaan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
		400.5.2.2      Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 tahun	Permanen
		400.5.2.3      Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda			
		400.5.3.1      Wawasan Kebangsaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.3.2      Wawasan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.3.3      Wawasan Sosial dan Hukum	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda			
		400.5.4.1      Kapasitas Iman dan Taqwa	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.4.2      Kapasitas IPTEK	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.4.3      Pemanfaatan IPTEK	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)			
		400.5.5.1      Pengkajian	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.5.2      Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Musnah



NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
		400.5.5.3      Pendayagunaan (fasilitasi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
		400.5.6.1      Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan (Pelatihan Kepemimpinan Pemuda)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.6.2      Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan (antara lain : Pelatihan dan Pengkaderan Kesukarelawanan Pemuda )	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.6.3      Paskibraka ( antara lain : KAK, Pemberitahuan terkait dengan penyeleksian dan pelatihan, Pelaksanaan Monev, Pelaporan )	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.5.7	Kewirausahaan			
		400.5.7.1      Kelembagaan (antara lain Seleksi WMP Berprestasi dan Penggerak WMP Berprestasi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.7.2      Pengaderan (antara lain pelatihan kewirausahaan pemula, peningkatan dan pengembangan kapasitas wirausaha muda)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.7.3      Perintisan (antara lain : Fasilitas Kemitraan Usaha Pemuda)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan			
		400.5.8.1      Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya ( antara lain : Seleksi Organisasi Kepemudaan Berprestasi, Fasilitas Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan, Pelatihan Keparlemenan bagi Pemuda, Pendataan Organisasi Kepemudaan )	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.8.2      Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya (antara lain : Pendataan Organisasi Kemahasiswaan)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.8.3      Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya (antara lain : Pendataan Organisasi Kepelajaran)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.8.4      Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya ( antara lain : Seleksi Tokoh Pramuka dan Tokoh Pemuda )	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.8.5      Hari Sumpah Pemuda	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda			
		400.5.9.1      Standardisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.9.2      Infrastruktur Pemuda	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda			
		400.5.10.1      Kemitraan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		400.5.10.2      Penghargaan Pemuda	2 tahun	3 tahun	Musnah
6	400.6	KEBUDAYAAN			
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman			
		400.6.2.1      Registrasi Nasional	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
		400.6.2.2      Pelindungan	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
		400.6.2.3      Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
		400.6.2.4      Eksplorasi dan Dokumentasi	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman			
		400.6.3.1      Pembinaan Seni Pertunjukan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		400.6.3.2      Pembinaan Seni Rupa	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		400.6.3.3      Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		400.6.3.4      Dokumentasi dan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya			
		400.6.4.1      Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.6.4.2      Pemetaan nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.6.4.3      Verifikasi dan Perumusan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.6.4.4      Dokumentasi dan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.6.4.5      Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.6.4.6      Publikasi sejarah dan nilai sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya			
		400.6.5.1      Internalisasi nilai budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.6.5.2      Kekayaan budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.6.5.3      Warisan budaya nasional dan dunia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.6.5.4	Diplomasi budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7	400.7	KESEHATAN			
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	400.7.1.1	Penyelenggaraan komite medik	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.1.2	Rekomendasi audit medis dan pelanggaran etika profesi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar			
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.9	Pembiayaan darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan			
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan ( KUK )	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik			
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.4.6	Peraturan internal staf keperawatan	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.4.7	Rekomendasi Kewenangan Klinis	2 Tahun	2 Tahun	Musnah
	400.7.4.8	Surat Penugasan Klinis	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.4.9	rincian kewenangan klinis	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.4.10	Rekomendasi pemulihan Kewenangan Klinis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.7.4.11	Rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.7.4.12	Rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.7.4.13	Rekomendasi pendidikan keperawatan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.7.4.14	Panduan (Panduan Asuhan Keperawatan, Panduan Kredensial Keperawatan, Panduan Etik Keperawatan).	3 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan			
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.3	Radiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.5.8	Surat Permintaan Bahan Habis Pakai untuk pemeriksaan TCM GenXpert TB	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.9	Surat Pengiriman Sampel Malaria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.10	Surat Pengantar Pemberitahuan Penyelesaian Pemeriksaan TCM GenXpert TB	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.7.5.11	Surat permintaan Bahan Habis Pakai atau Reagan (Rapid Antigen) VTM, Masker N95, Anti HCV,HIV, Dan lain-lain)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.12	Surat Pengantar Pemberitahuan Penyelesaian Pemeriksaan HIV Viral Load	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.13	Surat pengiriman sampel SGTF	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.14	Surat pengiriman sampel EID (Early Infant Diagnosis (Dikrim Ke RSUD.Dr.Sutomo)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.15	Surat permintaan Bahan Habis Pakai ke KEMENKES RI	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.16	Surat Penambahan atau Up grade Alat ke PT yg bekerjasama dengan Lab (KSO Alat)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5.17	Surat Permintaan Uji Fungsi dan Kesesuaian Alat Kesehatan	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.18	Surat Berita Acara Kerusakan Alat Kesehatan	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.19	Surat Telaah Permintaan Kalibrasi Alat Kesehatan	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.20	Surat permintaan barang dan spare part alat kesehatan	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.21	Surat hasil report pemeriksaan alat kesehetan	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.22	Surat bukti penyerahan barang alat kesehatan dari rekanan pihak ke-3	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.23	Surat permintaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kesehatan ke rekanan pihak ke-3	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.24	Surat berita acara kerusakan barang ke Instalasi terkait	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.25	Surat permintaan pengadaan barang fasilitas sarana dan prasarana	6 Tahun	7 Tahun	Permanen
	400.7.5.26	Pengelolaan pelayanna radiologi	5 Tahun	6 Tahun	Musnah
	400.7.5.27	Pengelelolaan bahan habis pakai radiologi	5 Tahun	6 Tahun	Musnah
	400.7.5.28	Pengelolaan pengembangan SDM (pendiidkan dan pelatihan serta kebutuhan staf)	5 Tahun	6 Tahun	Musnah
	400.7.5.29	Pengelolaan laporan dan evaluasi pelayanan radiologi	5 Tahun	6 Tahun	Musnah
	400.7.5.30	Pengelolaan perizinan dan sertifikasi alat radiologi	5 Tahun	6 Tahun	Musnah
	400.7.5.31	Pengelolaan peralatan dan maintenance alat radiologi	5 Tahun	6 Tahun	Musnah
	400.7.5.32	Pengelolaan proteksi radiasi radilogi	5 Tahun	6 Tahun	Musnah
	400.7.6	Kesehatan Jiwa			
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra			
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.7.2	Imunisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.7.4	Kesehatan matra	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung			
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang			
	400.7.9.1	Pengendalian malaria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular			
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.10.3	Penyakit kanker	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11	Penyehatan lingkungan			
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.6	Penyelenggaraan Penyehatan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.7	Penyelenggaraan Penyehatan Sarana dan Bangunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.8	Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.9	Penyelenggaraan Pengawasan Linen (Laundry)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.10	Penyelenggaraan Pengawasan Proses Dekontaminasi Melalui Disinfeksi dan Sterilisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.11	Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Konstruksi/Renovasi Bangunan dan Rumah Sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.11.12	Penyelenggaraan Pengawasan Rumah Sakit Ramah Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.13	Gizi			
	400.7.13.1	Gizi makro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.13.2	Gizi mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.14	Kesehatan ibu			
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.14.4	Keluarga berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.15	Kesehatan anak			
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer			
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga			
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.17.2	Kapasitas kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.17.3	Lingkungan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan			
	400.7.18.1	Harga obat publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.18.2	Pengadaan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan			
	400.7.19.1	Alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.20	Kefarmasian			
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.20.2	Farmasi klinis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.20.5	Komite farmasi dan terapi	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
	400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian			
	400.7.21.1	Obat tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
	400.7.22.1	Surat keterangan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.22.3	Surat visum korban hidup		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.22.4	Surat visum jenazah		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan				
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.23.6	Pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja		3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	400.7.23.7	Pencegahan, pengendalian dan penanganan PAK dan KAK		3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	400.7.23.8	Pengembangan progra penanganan B3 dan limbah		3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	400.7.23.9	Pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan kerja dan sarana prasarana		3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	400.7.23.10	Pengelolaan sistem utilitas		3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	400.7.23.11	Pengembangan menejemen tanggapan darurat bencana		3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan				
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.25	Intelegensia Kesehatan				
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.26	Kesehatan Haji				
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.27	Promosi Kesehatan				
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.27.4	Hari kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.28	Data dan Informasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.28.1	Statistik kesehatan				
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi		2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen		2 Tahun	3 Tahun	Pemanen
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik				
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya				
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.31	Rekam Medis		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				d disesuaikan dengan peraturan kementerian/lembaga terkait		
8	400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN				
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	400.8.2	Fasilitasi				
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.8.2.4	Kasus Keagamaan		1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan		1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME				
	400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
9	400.9	SOSIAL			
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak			
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial			
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia			
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial			
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam			
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.10.4	Kerjasama	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.11	Jaminan Sosial			
	400.9.11.1	Seleksi dan vrfikasi	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.11.4	Kerjasama	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial			
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil			
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.14.5	Bantuan Langsung	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
	400.9.15	Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial			
	400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
10	400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan			
	400.10.2.1	Fasilitas Pengembangan Desa dan Kelurahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.2.3	Fasilitas Permusyawaratan Desa	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.2.4	Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat			
	400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.10.4	Pemberdayaan			
	400.10.4.1	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat			
	400.10.4.1	Budaya Nusai Budaya Nusantara	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.4.2	Pemberdayaar Pemberdayaan Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.4.3	Pemberdayaar Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.4.4	Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.4.5	Tenaga Kerja i Tenaga Kerja Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat			
	400.10.5.1	Usaha Pertanian Usaha Pertanian dan Pangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.5.2	Usaha Perkrec Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.5.3	Produksi dan Produksi dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.5.4	Usaha Ekonoi Usaha Ekonomi dan Keluarga	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.5.5	Ekonomi Perd Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan			
	400.10.6.1	Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.6.2	Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.6.3	Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.6.4	Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	2 tahun	3 tahun	Musnah
11	400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN			
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	400.11.2	Pertamanan			
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.2.2	Taman Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.3	Pemakaman			
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.3.2	Pemakaman	3 tahun	7 tahun	Permanen
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.4	Jalur Hijau			

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	400.11.7	Pengelolaan Data	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah
12	400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk			
	400.12.2.1	Identitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.3	Pencatatan Sipil			
	400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan			
	400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.5.2	Kualitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.6	Penyerasian Kependudukan			
	400.12.6.1	Indikator Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
13	400.13	KELUARGA BERENCANA			
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk			
	400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai Kembali
	400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk			
	400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai kembali
	400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk			
	400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk			
	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen



NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk			
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.13.7	Pengembangan Sistem			
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	400.13.8	Pengembangan Materi			
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi			
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.10	Analisis Sosial	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.11	Analisis Ekonomi	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah			
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta			
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah standar diperbarui	3 Tahun	Permanen
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah standar diperbarui	3 Tahun	Permanen
	400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan			
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan			
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria			
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak			
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak			
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja			
	400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja			
	400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
	400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
	400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan			
	400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga			
	400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi			
	400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.41 Advokasi dan pencitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi			
	400.13.42.1 Promosi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.13.42.3 Produk media komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah			
	400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.46 Tenaga Lini Lapangan			
	400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan			
	400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan			
	400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan			
	400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.13.51 Analisis dan evaluasi			
	400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data			
	400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.52.2 Pengelolaan bank data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi			
	400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi			
	400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
14	400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT			
	400.14.1	Keprotokolan			
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	Selama berlaku	-	Musnah
	400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	1 tahun	1 Tahun	Permanen
	400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan			
	400.14.4.1	Kliping koran	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah			
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.5.5	Forum Kehumasan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.10	Pameran/sayembara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
VI	500	PEREKONOMIAN			
1	500.1	KETAHANAN PANGAN			
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.2.2	Akses Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan			
	500.1.3.1	Distribusi Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.3.2	Harga Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.3.3	Cadangan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan			
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan			
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.1.7	Bimbingan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.1.8	Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
2	500.2	PERDAGANGAN				
	500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri				
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan		2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan		2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.5	Pelaku Pasar		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.6	Iklm Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.14	Informasi Pasar		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.16	Barang Strategis		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Permanen
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	8 Tahun	Permanen
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.2.3.4	Tata usaha		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi		3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan		3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.2.3.11	Jasa		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
	500.2.3.12	Kerjasama		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama		3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Permanen
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran		2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	500.2.3.16	Pengawasan		2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi				
	500.2.4.1	Pengkajian pasar		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.4.4	Pengkajian pasar		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.4.6	Sistem informasi		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.5	Bimbingan Teknis	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
	500.2.6	Evaluasi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
3	500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM			
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun .	3 Tahun	Permanen
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	500.3.2.5	Penyuluhan Koperasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	500.3.2.6	Konsultan/PLUT	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	500.3.2.7	Pengawasan Koperasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.3	Produksi			
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.4	Pembiayaan			
	500.3.4.1	Program Pendanaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.3.4.3	Urusan Permodalan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha			
	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.6.5	Advokasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.6.6	Pengembangan Usaha Mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.6.7	Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.6.8	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha			
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.7.6	Pameran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK			
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	500.3.8.2	Penelitian UKM	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
	500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	500.3.9.1	Koordinasi dan Konsultasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.9.2	Perjanjian Kerjasama	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	500.3.9.3	Nota Kesepahaman (MoU)	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)			
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.3.12	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	500.4	KEHUTANAN			
	500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.4.2	Penyuluhan			
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.2.3	Program Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.2.8	Deseminasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.3	Planologi Kehutanan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4	Bina Usaha Kehutanan			
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.3	Kerjasama	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.5	Perpanjangan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.7	Investasi Industri	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.8	Peralatan	3 tahun	7 tahun	Musnah
	500.4.4.9	Tenaga Kerja	3 tahun	2 tahun	Musnah
	500.4.4.10	Pemegang Saham	3 tahun	7 tahun	Musnah
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.4.17	Produksi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.4.18	Produksi non kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.4.21	Industri Non Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi	3 tahun	2 tahun	Musnah
	500.4.4.25	Pemblokiran	3 tahun	2 tahun	Musnah
	500.4.4.26	Denda	3 tahun	7 tahun	Musnah
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
		500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
		500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.5	Standarisasi dan Lingkungan				
		500.4.5.1	Standarisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.5.3	Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
		500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.6.5	Kawasan Konservasi	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.6.6	Pengamanan Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.6.11	Bina Cinta Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial				
		500.4.7.1	Pengelolaan Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.7.2	Kebun Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.7.3	Tegakan Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.7.4	Pengadaan Benih	3 tahun	7 tahun	Musnah
		500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		500.4.7.7	Pembibitan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
		500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.7.12	Tanaman Reboisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.7.14	Perhutanan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.7.15	Pengendalian Perladangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				
		500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.8.3	Diseminasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.8.4	Gelar Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5	500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
		500.5.2	Perikanan Tangkap			



NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.14	Kenclayanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.17	Fasilitas Perizinan (antara lain: Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan/SKP)	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.18	TPI/PPI	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.2.19	Kesyahbandaran	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.3	Perikanan Budidaya			
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.3.17	Residu Ikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.2	Pengembangan Produk	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.8	Pengembangan Industri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.5.4.18	Pengembangan Impor	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.4.25	Rekomendasi Kelayakan Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.17	Akses Permodalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan			
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.6.17	Penyidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3 tahun	7 tahun	Permanen
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.6.21	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7	Karantina Ikan			
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.2	Penahanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.3	Pengasingan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.4	Pengamatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.5	Pengakuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.6	Penolakan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.7	Pemusnahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.14	Surat Perintah		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.15	Rekomendasi		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan		3 tahun	7 tahun	Musnah
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional		3 tahun	7 tahun	Musnah
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.5.7.21	Lokasi Karantina		2 tahun	3 tahun	Musnah
6	500.6	PERTANIAN				
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.6.2	Perlindungan hortikultura				
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura (Budidaya dan Pascapanen)				
	500.6.3.1	Penilaian Varietas		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.3.4	Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.3.5	Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Sayur dan Tanaman Obat		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan				
	500.6.4.1	Basis Data Lahan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.4.6	Jalan Usaha Tani		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi				
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.5.4	Kelembagaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian				
	500.6.6.1	Pembiayaan Program		2 tahun setelah data diperbarui/ update	3 tahun	Permanen
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.7	Pupuk Pestisida				
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.7.3	Pestisida		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian				
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan				
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.10	Budidaya Serealia				
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa		2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.10.3	Jagung	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.10.4	Serealiala Lain	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi			
	500.6.11.1	Kedelai	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.11.2	Ubi Kayu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.11.3	Aneka Kacang	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.11.4	Aneka Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.11.5	Gudang Benih	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12	Tanaman Pangan			
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.5	Sosialisasi DPI Pangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.12.6	Gerdal OPT Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.7	Sosialisasi OPT Pangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.12.8	Gerdal DPI Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.9	Gerdal OPT Hortikultura	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.10	Klinik PHT	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.11	Penerapan PHT	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.12.12	DPI Hortikultura	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan			
	500.6.13.1	Padi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.13.2	Jagung dan Serealiala alin	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.13.4	Aneka Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian			
	500.6.14.1	Tanaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.14.2	Holtikultura	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.14.3	Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.14.4	Peternakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.15	Mutu dan Standariasi			
	500.6.15.1	Standardisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.15.5	Sertifikasi Tanaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.15.6	Sertifikasi Tanaman Hortikultura	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi			
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.16.2	Investasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.17	Pemasaran Domestik			
	500.6.17.1	Informasi Pasar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.17.4		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan			
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.20	Diseminasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian			
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	2 tahun setelah data dipebarui/ update	8 tahun	Permanen
	500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	1 tahun	1 tahun	Permanen
	500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
	500.6.26.1	Hak Cipta	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
	500.6.26.4	Hak Merek	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	1 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	1 tahun	Musnah
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	2 tahun	1 tahun	Musnah
	500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian			
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.28	Pelayanan Hukum			
	500.6.28.1	Sertifikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	2 tahun	8 tahun	Permanen
	500.6.29	Karantina Pertanian			
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.29.2	Karantina Hewan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.30	Bimbingan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.31	Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.32	Penyuluhan Pertanian			
	500.6.32.1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.32.2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.32.3	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.32.4	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.32.5	Korporasi Petani	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.32.8	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.33	Pendidikan dan Pelatihan Pertanian			
	500.6.33.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.33.2	Materi Diklat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.33.5	Panduan fasilitator	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.33.6	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Diklat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.34	Penyelenggaraan Diklat Pertanian			
	500.6.34.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.34.2	Sistem Informasi dan bahan ajar diklat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.6.34.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	2 tahun	3 tahun	Musnah
7	500.7	PETERNAKAN			
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan			
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.7.2.2	Pakan Ternak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.7.2.3	Budidaya Ternak	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.7.3	Bimbingn Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.7.4	Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.7.5	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan			
	500.7.5.1	Data dan Informasi Peternakan (Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Peternakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.7.5.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha Peternakan	2 tahun	3 tahun	Musnah
8	500.8	PERKEBUNAN			
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.8.2	Tanaman Semusim			
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar			
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.4	Tanaman Tahunan			
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan			
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha			
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
9	500.9	PERINDUSTRIAN			
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama			
	500.9.2.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.9.2.2	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.9.3	Promosi Industri			
	500.9.3.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.9.3.5	Pameran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi			
	500.9.4.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.4.2	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual			
	500.9.5.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.5.2	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.6	Industri Hijau			
	500.9.6.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.6.2	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.9.8.1	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.9.9.1	Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.9.2	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.9.3	Kawasan Ekonomi Khusus	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.9.4	Sentra IKM	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.9.5	Kawasan Peruntukan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.9.6	Kawasan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.12	Standarisasi			
	500.9.12.1	Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri			
	500.9.13.1	Kebijakan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.13.4	Izin Usaha Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup			
	500.9.14.1	Industri Hijau	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.14.3	Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual			
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.17	Fasilitasi Pengembangan Industri Kerajinan Khas Daerah			
	500.9.17.1	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.18	Koordinasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.19	Informasi Industri			
	500.9.19.1	Data	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.19.2	SIINas	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.20	Sumber Daya Industri			
	500.9.20.1	Sumber Daya Alam	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.20.2	Sumber Daya Manusia	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.20.3	Sarana dan Prasarana Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.21	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.9.22	Laporan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
10	500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.10.2	Rekomendasi Kegeologian			
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.10.2.3	Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.2.4	Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.2.5	Geosains	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.3	Penelitian Kegeologian			
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.3.9	Survei Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian			
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.4.4	Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.4.5	Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi			
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.5.4	Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi			
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi			
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)	5 Tahun	5 Tahun	Musnah
	500.10.7.3	Eksploritasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploritasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS	2 Tahun setelah masa perpanjangan kontrak selesai	10 Tahun kecuali c 30 Tahun	Permanen
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	2 Tahun setelah Penetapan Harga Gas yang baru	5 Tahun	Musnah
	500.10.7.7	Partisipasi Interest	2 Tahun setelah Penetapan Harga Gas yang baru	5 Tahun	Permanen



NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan	2 Tahun setelah disetujui	5 Tahun	Permanen
	500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi			
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	2 Tahun	5 Tahun,	Musnah,
	500.10.9	Teknik dan Lingkungan			
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	500.10.9.10	Usaha penunjang	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi			
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi			
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.12	Panas Bumi			
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	3 Tahun setelah lelang WKP selesai	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.13	Bioenergi			
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.13.5	Evaluasi/ Revisi HIP BBN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.14	Aneka Energi			
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.15	Konservasi Energi			
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE			
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik			
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan			
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan			
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.20	Sertifikasi				
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik		2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Permanen
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)		2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Permanen
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik		2 Tahun Setelah Habis Masa Berlakunya	3 Tahun	Permanen
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi		2 Tahun setelah masa berlaku	3 Tahun	Permanen
	500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan		2 Tahun setelah masa berlaku	3 Tahun	Permanen
	500.10.22	Standarisasi Kompetensi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan				
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan				
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan		2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan		2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)		2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT		2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan		2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
	500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara				
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara		3 Tahun setelah diperbarui	7 Tahun	Permanen
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral				
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral		2 Tahun	5 Tahun	Musnah
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral		2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)		3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)		2 Tahun setelah diperpanjang	3 Tahun	Permanen
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Sepanjang tidak ada sengketa	5 Tahun	Permanen
	500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara			
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara	2 Tahun	10 Tahun, kecuali b, 5 Tahun	Permanen, kecuali b dan c, musnah
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Sepanjang masih diperlukan	10 Tahun	Permanen
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	3 Tahun setelah diperpanjang	7 Tahun	Permanen
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara	2 Tahun	10 Tahun, kecuali b, 5 Tahun	Permanen, kecuali b dan c, musnah
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.28	Penerimaan Negara			
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
	500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara			
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
	500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.18	Pengawasan   Konservasi Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan			
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.31	Sarana Litbang			
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	1 Tahun setelah peralatan dihapus	5 Tahun	Permanen
	500.10.32	Afiliasi			
	500.10.32.1	Proyek Percontohan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.10.32.4	Penyajian Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian			
	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
	500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi			
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
	500.10.34.3	Laboratorium	2 Tahun setelah penelitian berakhir	3 Tahun	Permanen
	500.10.34.4	Study	2 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	3 Tahun	Permanen
	500.10.34.5	Teknologi Proses	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.34.7	Teknologi Gas	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara			
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.10.36.1	Energi baru terbarukan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
11	500.11	PERHUBUNGAN			
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	500.11.1.1	Rekomendasi Izin Rencana Induk Pelabuhan Provinsi (RIPP) dan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr)/Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKp)	5 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.1.2	Rekomendasi Izin Pelabuhan Ship to Ship (STS)	5 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.1.3	Rekomendasi Izin Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Khusus Kepentingan Sendiri (TUKS)	5 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan			
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan			
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor			
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor			
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.7	Perlengkapan Jalan			
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.8	Angkutan Penumpang			
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	500.11.8.7	Angkutan perintis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.9	Angkutan Barang			
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	500.11.10	Monitoring Operasional			
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil			
	500.11.11.1	Pedoman Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.11.3	Bimtek PPNS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.15.3	Standar pelayanan minimal (SKM) kapal sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.21	Tarif dan Keperintisan			
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan			
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.24	Angkutan Perkotaan			
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.25	Pemadu Moda Transportasi Perkotaan				
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.25.2	Pemadu moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan				
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan				
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.28	Pengembangan Keselamatan				
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan				
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum				
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.31	Audit Keselamatan				
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.32	Inspeksi Keselamatan				
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.11.33	Parkir				
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta		Berlaku selama masih digunakan	3 Tahun	Musnah
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	500.11.34	Lingkungan Perhubungan (antara lain: Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Terminal, Pelabuhan dan Bandara)		3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35	Perkeretaapian		3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35.1	Pintu lintas kereta api		3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35.2	Signal/tanda rambu perkeretaapian		3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35.3	Perizinan perkeretaapian		3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35.4	Sarana dan prasarana meliputi lokomotif, gerbong, bogie (jalan/jembatan) perkeretaapian		3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35.5	Trayek perkeretaapian		3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35.6	Angkutan Penumpang, angkutan barang perkeretaapian		3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35.7	Keselamatan Perkeretaapian		3 Tahun	2 Tahun	Permanen



NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.11.35.8	Kecelakaan perkeretaapian	3 Tahun	2 Tahun	Permanen
	500.11.35.9	Perawatan/perbaikan perkeretaapian			
12	500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	500.12.2	Telekomunikasi			
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.3	Penyiaran			
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal			
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.5	Pengendalian Informatika			
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.6	e- Government			
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.7	e- Business			
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat			
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika			
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.10	Keamanan Informasi			
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.12.11	Komunikasi Publik			
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi			
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	500.12.13	Pengelolaan Media Publik			
	500.12.13.1	Media Cetak	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	500.12.13.2	Media Online	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
	500.12.14	Kemitraan Komunikasi			
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	500.12.15	Infrastruktur Informatika			
	500.12.15.1	Jaringan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.15.3	Keamanan Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.16	Sistem dan Data			
	500.12.16.1	Portal dan Konten	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.17	Pusat Kerjasama			
	500.12.17.1	Kerja Sama daerah	2 tahun	3 Tahun	Permamen
	500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral	2 tahun	3 Tahun	Permamen
	500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat			
	500.12.18.1	Pelayanan Informasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.18.2	Hubungan Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.18.3	Bimbingan Teknis	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.18.4	Pers/Media/Massa	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.18.5	Pameran	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.18.6	Sosialisasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.19	Evaluasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.20	Publikasi			
	500.12.20.1	Penerbitan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.20.2	Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.21	Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	500.12.21.1	Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.22	Perumusan Kebijakan Bidang Statistik			
	500.12.22.1	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.22.2	Penyiapan Kebijakan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.22.3	Masukkan dan Dukungan dalam Penyusunan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.22.4	Pengembangan Desain dan Standarisasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.22.5	Penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NPSK)	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	500.12.23	Sensus dan Survei Sektoral			
	500.12.23.1	Perencanaan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.23.2	Persiapan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.23.3	Pelatihan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.23.4	Pelaksanaan Lapangan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.23.5	Pengolahan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.23.6	Analisis Dan Penyajian Hasil Sensus	2 tahun	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.12.23.7	Diseminasi Hasil Sensus	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	500.12.24	Evaluasi dan Pelaporan Survei dan Konsolidasi Data			
	500.12.24.1	One Data One Map	2 tahun	3 Tahun	Musnah
13	500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata			
	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata (antara lain: Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Kawasan Pariwisata, Kawasan Strategis)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.13.2.3	Industri Pariwisata (antara lain: Pembinaan/Pengawasan Usaha Pariwisata, Investasi Pariwisata, Fasilitas/Standarisasi)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (antara lain: Kelompok Sadar Wisata)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata			
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (antara lain: Tourism Information Centre)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri (antara lain: Pameran Luar Negeri, Event Promosi, Foto/Video)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri (antara lain: Pameran Dalam Negeri, Event Promosi, Duta wisata/Putri Pariwisata, Foto/Video)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.3.5	Promosi dan informasi Potensi dan peluang investasi daerah	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	500.13.3.6	Promosi dan informasi Potensi wisata dan budaya	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	500.13.3.7	Promosi dan informasi tentang IKN	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	500.13.3.8	Promosi dan informasi tentang Mess Kaltim di Jakarta	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya			
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.4.4	Pengelolaan Anjungan TMII	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	500.13.4.5	Pengembangan Anjungan TMII	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	500.13.4.6	Peningkatan fasilitas promosi produk unggulan dan seni budaya	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	500.13.4.7	Kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK			
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitas (antara lain: Sarana & Prasarana Ekonomi Kreatif)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (antara lain: Kemitraan SDM Parekraf, SDM Usaha Pariwisata, SDM Ekonomi Kreatif)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (antara lain: Pramuwisata)	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
14	500.14	STATISTIK				
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi				
	500.14.2.1	Perencanaan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba		1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan		1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)		1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus		1 tahun	1 tahun	Musnah
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.14.3	Survei				
	500.14.3.1	Perencanaan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.14.3.2	Persiapan		1 tahun	1 Tahun	Permanen
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)		1 tahun	1 Tahun	Permanen
	500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner ), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)		1 tahun	1 Tahun	Musnah
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)		1 tahun	1 Tahun	Musnah
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.14.4	Konsolidasil Data Statistik				
	500.14.4.1	Kompilasi Data		1 tahun	1 Tahun	Musnah
	500.14.4.2	Analisis data		1 tahun	1 Tahun	Musnah
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik		2 tahun	3 tahun	Permanen
15	500.15	KETENAGAKERJAAN				
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja				
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan		2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga		3 tahun setelah kerjasama selesai dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	7 tahun	Permanen
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan				
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah		2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
		500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.6		Bina Pemagangan			
		500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.7		Produktivitas dan Kewirausahaan			
		500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.8		Pengembangan Pasar Kerja			
		500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.8.3	Bursa Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.8.4	Analisis Jabatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.9		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			
		500.15.9.1	Antar Kerja Antar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.9.2	Penempatan I Penempatan Tenaga Kerja Khusus	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.9.3	Penyuluhan d Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.9.4	PemberdayaaI Pemberdayaan Pengantar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal			
		500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.11		Standardisasi Profesi			
		500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi			
		500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.12.2	Perjanjian Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.13		Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial			
		500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
		500.15.14.1	Pengupahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial			
		500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
		500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
		500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.18		Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
		500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.20	Bina Penegakan Hukum			
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen
16	500.16	PENANAMAN MODAL			
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal			
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal			
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.4.4	Promosi Sektoral	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal			
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal			
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	2 tahun	3 tahun	Permanen
17	500.17	PERTANAHAN			
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan			
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah			
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	2 tahun setelah ijin tidak	3 tahun	Musnah
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	2 Tahun setelah Data diperbarui	3 tahun	Permanen
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.17.4	Sengketa Tanah			
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	2 tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	2 tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
18	500.18	TRANSMIGRASI			
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi			
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi			
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi			
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.5	Partisipasi Masyarakat			
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi			
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat			
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	500.18.8	Pengembangan Usaha			
	500.18.8.1	Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.8.2	Produksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan			
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan			
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
VII	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN			
1	600.1	PEKERJAAN UMUM			
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air			
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.2.2	Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air			
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.3.2	Manajemen Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air			
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.5.5	-	-	-	-
	600.1.6	-			
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan			
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.8	Pembangunan Jalan			
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.9	Preservasi Jalan			
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.10	Pengelolaan Jembatan			
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	600.1.10.3	Teknik Jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah			
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.11.4	Konektifitas jaringan jalan pusat dan daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.12	Pengaturan Jalan Tol			
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman			
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.14.5	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan			
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.15.5	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.16.5	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman			
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.17.5	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
	600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan			
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.2.3	Kemitraan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan			
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan			
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan			
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.5.2	Analisa Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.6	Penyediaan Rumah Susun			
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.6.2	Penyediaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.6.4	Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus			
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial			
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.8.3	Fasilitas Hunian Berimbang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.8.4	Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.9	Investasi Infrastruktur			
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.2.9.3	Fasilitas dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.2.10.4	Manajemen Mutu	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			
	600.2.11.1	Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi			
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi			
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.15.2	Pengembangan Materi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)			
	600.2.16.1	Antar Sektor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.16.2	Antar Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis			
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan			
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)			
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	600.3.2	Perencanaan			
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
	600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian			
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
	600.3.4	Pemetaan			
	600.3.4.1	Peta Dasar	1 tahun	1 tahun	Permanen
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	1 tahun	1 tahun	Musnah
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	1 tahun	1 tahun	Musnah
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	1 tahun	1 tahun	Musnah
4	600.4	LINGKUNGAN HIDUP			
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.5	Dampak Lingkungan			
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	3 tahun	7 tahun	Permanen
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan			
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	3 tahun	7 tahun	Permanen
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	3 tahun	7 tahun	Permanen
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	3 tahun	7 tahun	Permanen
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	3 tahun	7 tahun	Permanen
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan			
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan			
	600.4.8.1	Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.8.2	Pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.8.4	Keamanan Hayati	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat			
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.9.2	Rawa	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer			
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 tahun	1 tahun	Musnah
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim			
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun			
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	1 tahun	1 tahun	Permanen
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	1 tahun	1 tahun	Permanen
	600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun			
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3			
	600.4.14.1	Pemantauan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.15	Pengelolaan Sampah			
	600.4.15.1	Pembatasan sampah	1 tahun	1 tahun	Permanen
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	1 tahun	1 tahun	Permanen
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	1 tahun	1 tahun	Permanen
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	1 tahun	1 tahun	Permanen
	600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan			
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan			
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
	600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan			
	600.4.18.1	Penyidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	3 tahun	7 tahun	Permanen
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	3 tahun	7 tahun	Musnah
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan			
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat			
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat			
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
		600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
		600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan				
		600.4.23.1	Pengelolaan Data	2 tahun	3 tahun	Permanen
		600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
		600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	2 tahun	3 tahun	Permanen
		600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan				
		600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	2 tahun	3 tahun	Permanen
		600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi				
		600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
		600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Llingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	2 tahun	3 tahun	Permanen
VIII	700	PENGAWASAN				
1	700.1	PENGAWASAN INTERNAL				
	700.1.1	Rencana Pengawasan				
		700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
		700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan				
		700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	2 Tahun setelah tindak lanjut selesai	3 Tahun	Permanen
		700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	2 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum	3 Tahun	Musnah
		700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum	3 Tahun	Permanen
		700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	2 Tahun setelah proses data di update	3 Tahun	Permanen
		700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
IX	800	KEPEGAWAIAN				
1	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA				
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
		800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)	2 Tahun sejak data diperbarui (update)	3 Tahun	Musnah
		800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama	3 Tahun	Musnah
		800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)	2 Tahun sejak standar baru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai				
		800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau	3 Tahun	Musnah
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.1.3	Mutasi Pegawai			
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.1.4	Pengembangan Karir			
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	1 Tahun sejak data diperbarui (update)	1 Tahun	Musnah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1 Tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara			
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Permanen
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN			

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	800.1.6.2	Disiplin	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain:	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.7	Bantuan Hukum	2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	3 Tahun	Musnah
	800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai			
	800.1.8.1	Status Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian			
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Musnah
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Musnah
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Permanen
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	1 Tahun sejak dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	800.1.10	Pengawasan dan pengendalian			
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	800.1.11	Administrasi Pegawai			

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.2	Cuti Sakit	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.3	Cuti Bersalin	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.4	Cuti Tahunan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.6	Cuti Besar	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	800.1.12	Kesejahteraan Pegawai			
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.4	Bantuan Sosial	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.5	Pakaian Dinas	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.12.10	Rekam Medis	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
	800.1.13	Administrasi Perseorangan			
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Tahun setelah penetapan pensiun	7 Tahun	Musnah
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3 Tahun setelah penetapan pensiun	7 Tahun	Musnah



NO	JENIS/SERIES ARSIP			RETENSI		KETERANGAN
				AKTIF	INAKTIF	
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan		1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah		1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional		1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen
	800.1.14	Penilaian Kompetensi				
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi		2 Tahun	3 tahun	Musnah
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi		2 Tahun	3 tahun	Musnah
2	800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah		2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan				
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat		2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Permanen
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan		2 Tahun	3 tahun	Permanen
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.2.2.4	Modul-modul diklat		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.2.2.5	Panduan fasilitator		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat		2 Tahun	3 tahun	Permanen
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat		2 Tahun	3 tahun	Permanen
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat		2 Tahun	3 tahun	Permanen
	800.2.3	Widyaiswara				
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara		2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara		2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara		1 Tahun	1 tahun	Musnah
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara		1 Tahun	1 tahun	Musnah
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara		2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat				
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat		1 Tahun	1 tahun	Musnah
	800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat		1 Tahun	1 tahun	Musnah
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat		1 Tahun	1 tahun	Musnah
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat		2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	800.2.5	Alumni		2 tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen
X	900	KEUANGAN				
1	900.1	KEUANGAN DAERAH				
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)				
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)		2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)		2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan		2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)		2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	900.1.1.5	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.1.6	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.2	Penyusunan Anggaran			
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	900.1.3	Pelaksanaan Anggaran			
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.3.2	Pendapatan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.3.3	Belanja	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.3.7	Daftar Gaji	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.3.8	Kartu Gaji	Selama yang bersangkutan masih jadi pegawai	3 tahun	Musnah
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.3.10	Laporan Keuangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri			
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	1 tahun setelah Diterbitkan	3 tahun	Permanen
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani	3 tahun	Permanen
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Musnah
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Musnah
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	900.1.4.11	Report /Laporan	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	900.1.4.13	Completion Report/ Annual Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun	Permanen
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Selama masih menjabat	3 tahun	Permanen
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)			
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Selama belum ada perubahan	3 tahun	Permanen
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Selama belum ada perubahan	3 tahun	Permanen
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan			
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Selama rekening masih aktif	1 tahun	Permanen
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)	Selama rekening masih aktif	5 tahun	Musnah
	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan			
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD	3 tahun	Musnah
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUd dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUd dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUd dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu			
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUd, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah			
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dilunasi	3 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
	900.1.12	Anggaran Daerah			
	900.1.12.1	Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah			
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan			
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	RETENSI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitas Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah			
	900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
	900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	1 tahun	2 tahun	Musnah
	900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	2 tahun	3 Tahun	Musnah
	900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)	2 tahun	3 Tahun	Permanen



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS  
(KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM  
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS)

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	000	UMUM					
1	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN					
	000.1.1	Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
	000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri					
	000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas					
	000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor					
	000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.2	Penghijauan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.3	Perbaikan Gedung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

2

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer					
	000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.9.2	Pemasangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.10	Ketertiban dan Keamanan					
	000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2	000.2	PERLENGKAPAN					
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan					
	000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor					
	000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.3	Distribusi					
	000.2.3.1	Barang habis pakai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.3.2	Barang milik daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
3	000.3	PENGADAAN					
	000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

3								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.3.7	Pembinaan dan Advokasi (antara lain: Advokasi, Kelembagaan, dan SDM)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
4	000.4	PERPUSTAKAAN						
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman		Biasa	Terbuka	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.3	Koleksi Pustaka						
	000.4.3.1	Pembelian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.2	Hibah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.3	Hadiah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.4	Tukar Menukar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.6	Terbitan Internal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait



4								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6	Layanan Perpustakaan						
	000.4.6.1	Keanggotaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.2	Peminjaman		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.4	Pengembalian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.5	Perpustakaan Keliling (Pusling) dalam kota		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.6	Perpustakaan Keliling (Pusling) luar kota/pelosok kota		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.7	Go-Book		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.8	Laper Sesaat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.9	Inovasi Layanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.10	Buncu Baca Indoor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.11	Buncu Baca Outdoor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.12	Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Offline		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.13	Pengelolaan Kotak Saran Offline		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.7	Kerjasama Perpustakaan						
	000.4.7.1	Memorandum of Understanding (MoU)		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

5

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan					
	000.4.8.1	Pengembangan situs web	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.5	Pengembangan aplikasi iKaltim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.6	Pengembangan web. Pustaka Borneo	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.7	Pengembangan SMS Reminder	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.8	Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Online	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.9	Pengelolaan Kotak Saran Online	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9.1	Data Layanan Perpustakaan SMA/SMK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9.2	Data Layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9.3	Data Layanan Perpustakaan Kota/Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9.4	Data Layanan Perpustakaan Instansi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9.5	Data Layanan Perpustakaan BUMN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9.6	Data Layanan Perpustakaan BUMD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9.7	Data Layanan Perpustakaan Organisasi Swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

6

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.4.9.8	Data Layanan Perpustakaan Perorangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.9.9	Data Layanan Pegiat Literasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.10	Konservasi					
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.12	Transformasi Digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.13	Kurasi Digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan					
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.5	Pembudayaan Kegemaran Membaca	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.6	Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca ( GPMB )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.7	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.8	Kajian Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat (IPLM)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.9	Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.10	Nomor Pokok Perpustakaan ( NPP )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.11	Akreditasi Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.12	Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.13	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

7

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.4.14.14 Bantuan / Stimulan Pengembangan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.15 Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
5	000.5 KEARSIPAN					
	000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	000.5.2 Pembinaan Kearsipan					
	000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.5.2.3 Penilaian Arsiparis (antara lain: Penilaian Arsiparis Terampil dan Penilaian Arsiparis Ahli )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	000.5.2.5 Data Base Arsiparis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.12 Bimbingan Teknis Kearsipan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.13 Pengembangan wawasan arsiparis ( antara lain : Sertifikasi Arsiparis dan Uji Kompetensi Arsiparis )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis					
	000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

8									
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identfkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, <u>Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga</u> )			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.6	Penyusutan Arsip							
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang <u>Dimusnahkan</u> )			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar <u>Arsip yang diserahkan</u> )			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang dialihmediakan)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis							
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis							
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar <u>arsip yang diserahkan</u> )			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

9

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber, Pembuatan Citra Daerah, Pameran Kearsipan )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip, Wisata Arsip, Siaga Arsip dan Edukasi Kearsipan )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan					
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal (antara lain: PKPKT, Instrumen Pengawasan Kearsipan, Laporan Hasil Pengawasan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal (antara lain: PKPKT, Instrumen Pengawasan Kearsipan, Laporan Hasil Pengawasan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.15.3	Sanksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	000.5.15.4	Pemilihan OPD Terbaik dilingkungan Pemerintah Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.15.5	Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kab / Kota Terbaik Tingkat Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
6	000.6	PERSANDIAN					
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.2	Pengamanan persandian					
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi					
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.3.3	Pelaksanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.3.4	Pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian					
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik					
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	000.6.5.7	Pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
7	000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang					
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.7.1.6	Musrenbang Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah					
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.6	Program kerja tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.8	Laporan Berkala	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.9	Laporan Insidental	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.10	Evaluasi Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah					
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6.5	Penerapan perencana aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan					
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



12

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
8	000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA						
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
	000.8.1.1	Pembentukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.1.2	Pengubahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.1.3	Pembubaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja					
	000.8.2.1	Analisa Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.3	Ketatalaksanaan					
	000.8.3.1	Proses Bisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.3.2	Standar Pelayanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.3.4	Pelayanan Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi					
	000.8.6.1	Budaya Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
9	000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN						
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

13

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					
	000.9.6.1	Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.6.2	Statistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.11	Invensi					
	000.9.1	Invensi Produk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.2	Invensi Proses	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.3	HKI Invensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.12	Inovasi					
	000.10.1	Inovasi Produk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.10.2	Inovasi Produk Layanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.10.3	Inovasi Proses	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.10.4	HKI Inovasi					
II	100	PEMERINTAHAN					
1	100.1	OTONOMI DAERAH					
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

14

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)					
	100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	100.1.4.5	Assosiasi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi )					
	100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2	100.2	PEMERINTAHAN UMUM					
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

15

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama						
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.6	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.7	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.8	Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeer		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.9	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan						
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit Pengolah Terkait
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
3	100.3	HUKUM						
	100.3.1	Program Legislasi						
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.1.2	Program Legislasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah					
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran					
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.5	Surat Perintah					
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama					

17

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	100.3.7.1	Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.7.2	Luar Negeri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum					
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
	100.3.11.4	Perburuhan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.3.11.5	Arbitrase	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	100.3.11.6	Sengketa Adat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

18

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	100.3.12	Perijinan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					
	100.3.13.1	Hak Cipta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	100.3.13.2	Hak Paten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.13.3	Hak Desain Industri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.13.5	Hak Merk	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
III	200	POLITIK					
1	200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara (antara lain: Duta Pancasila, Paskibraka)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.2.3	Bela Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait
	200.1.2.6	Gerakan Nasional Revolusi Mental (antara lain: Karakter Bangsa)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait
	200.1.3	Kewaspadaan Nasional					
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, <del>dan/ atau ketertiban umum</del>	Unit Pengolah Terkait
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan					
	200.1.4.1	Ketahanan Seni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait
	200.1.4.6	Fasilitasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun.</u>	Unit pengolah terkait



20

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5	Politik Dalam Negeri					
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik (antara lain: TP3D, Pokja IDI, Aplikasi SIPPDEH dengan Kab/Kota sosial, Sosialisasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.7	Database Parpol	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.9	Pemilihan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi					
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

21

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
2	200.2	PEMILU					
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih					
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu					
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu					
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.5	Pencalonan Pemilu					
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.5.3	Daftar bakal calon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.6	Kampanye Pemilu					
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.7	Dana Kampanye					
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara					
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.8.2	Master surat suara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

23

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu					
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
IV	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
1	300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja					
	300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja (antara lain: Operasional dan Pengendalian, Pengamanan pengawalan protokoler)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil					
	300.1.5.1	Surat Perintah Penyidikan dan Penyilidikan (Sprindik)	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan / atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
	300.1.5.2	Surat Perintah Penahanan.	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan / atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
	300.1.5.3	Surat Permintaan.	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan / atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait

24

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	300.1.5.4	Surat Pemberitahuan.	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
	300.1.5.5	Berita Acara.	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
2	300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN						
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan					
	300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun	Unit pengolah terkait
	300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun	Unit pengolah terkait
	300.2.2.6	Registrasi BEACON	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan					
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

25

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.8	Operasi Komunikasi					
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.8.3	Registrasi BEACON	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi					
	300.2.12.1	Laporan Harian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.12.2	Laporan Bulanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.12.3	Laporoan Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.12.4	Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
V	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT					
1	400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya					
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

26

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur					
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha					
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

27

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya					
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus					
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2	400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum					
	400.2.2.1	Data gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.2.2.3	Monitoring, Evaluasi, Analisis dan Pendampingan PUG	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.2.2.4	Sosialisasi PUG Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosbud	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.2.5	Koordinasi dan Singkronisasi PUG	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)					
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.3.8	Pengaduan Masyarakat Korban Kekerasan Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.3.9	Rujukan Korban Kekerasan perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)					
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

29

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.2.4.2	Data perlindungan anak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.4.6	Pengaduan Masyarakat Korban Kekerasan Terhadap Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.4.7	Rujukan Korban Kekerasan Terhadap Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)					
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
3	400.3	PENDIDIKAN					
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal					

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.2.4	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat					
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.3.3	Pembinaan Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.3.5	Pameran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.3.6	Rakor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.3.7	Sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama					
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.5.2	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus					
	400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.6.2	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.3.6.3	Lomba, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.6.5	Pendataan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.6.6	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik					
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.7.7	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.8	Sekolah Menengah Atas					
	400.3.8.1	Kurikulum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.8.2	Bahan Ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.8.3	Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.8.4	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus					
	400.3.9.1	Bahan ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

32

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.3.9.3	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.9.8	Pendataan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik					
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.10.3	Setifikasi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.10.7	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.11	Penilaian Pendidikan					
	400.3.11.1	Penilaian Akademik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan					
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan					
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
4	400.4	KEOLAHRAGAAN					
	400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan					
	400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal antara lain : (Bimtek, Seminar, Pelatihan Pelatih, Pelatihan Wasit/Juri, Pelatihan Instruktur)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.2.4	Penyelenggaraan Kompetisi, antara lain : (TOR, SK Panitia, Pemanggilan Peserta, Laporan )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.2.5	Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Aplikasi Seport Development Index (SDI) antara lain : (TOR, SK Panitia, Surat Menyurat, Laporan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi					
	400.4.3.1	Olahraga Massal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.3.2	Olahraga Tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga					
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

34

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus					
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.5.2	Layanan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga					
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga					
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.7.2	Kompetisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan					
	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga					
	400.4.9.1	Industri Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.9.2	Promosi Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.10	Olahraga Prestasi					
	400.4.10.1	Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.10.2	Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.10.3	Internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga					
	400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
5	400.5	KEPEMUDAAN					

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda					
	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.2.3	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda					
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda					
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)					
	400.5.5.1	Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.5.2	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda					
	400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan (Pelatihan Kepemimpinan Pemuda)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan (antara lain : Pelatihan dan Pengkaderan Kesukarelawaan Pemuda )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.6.3	Paskibraka (antara lain : KAK, Pemberitahuan terkait dengan penyeleksian dan pelatihan, Pelaksanaan Monev, Pelaporan )	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.7	Kewirausahaan					
	400.5.7.1	Kelembagaan (antara lain Seleksi WMP Berprestasi dan Penggerak WMP Berprestasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.7.2	Pengaderan (antara lain pelatihan kewirausahaan pemula, peningkatan dan pengembangan kapasitas wirausaha muda)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.7.3	Perintisan (antara lain : Fasilitasi Kemitraan Usaha Pemuda)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan					



36								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya ( antara lain : Seleksi Organisasi Kepemudaan Berprestasi, Fasilitas Kegiatan Organisasi Kepemudaan, Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan, Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda, Pendataan Organisasi Kepemudaan )		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya (antara lain : Pendataan Organisasi Kemahasiswaan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya (antara lain : Pendataan Organisasi Kepelelajaran)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya (antara lain : Seleksi Tokoh Pramuka dan Tokoh Pemuda )		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.8.5	Hari Sumpah Pemuda		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda						
	400.5.9.1	Standardisasi (antara lain keamanan bangunan sarpras kepemudaan, Minimal sarpras bangunan kepemudaan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda (antara lain : Sarana dan prasarana pelayanan kepemudaan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda						
	400.5.10.1	Kemitraan (Seleksi PPAN, Seleksi PPAP, Penilaian Panji Pembangunan Kepemudaan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda (antara lain : Seleksi Pemuda Berprestasi, Seleksi Pemuda Pelopor, Seleksi Pemuda Penyandang Disabilitas Berprestasi)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
6	400.6	KEBUDAYAAN						
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman						
	400.6.2.1	Registrasi Nasional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.2.2	Pelindungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman						
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya						
	400.6.4.1	Sejarah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

37

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.6.4.2	Pemetaan nilai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya					
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.5.2	Kekayaan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.5.4	Diplomasi budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
7	400.7 KESEHATAN						
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.1.1	Penyelenggaraan komite medik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.1.2	Rekomendasi audit medis dan pelanggaran etika profesi	Rahasia	Tertutup	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi komite medik	Unit pengolah terkait
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar					
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

38								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.9	Pembiayaan darah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan						
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan ( KUK )		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik						
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

39

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.6	Peraturan internal staf keperawatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.7	Rekomendasi Kewenangan Klinis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.8	Surat Penugasan Klinis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.9	Rincian kewenangan klinis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.10	Rekomendasi pemulihan Kewenangan Klinis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.11	Rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis		Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.4.12	Rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.13	Rekomendasi pendidikan keperawatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.4.14	Panduan (Panduan Asuhan Keperawatan, Panduan Kredensial Keperawatan, Panduan Etik Keperawatan).		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan						
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.3	Radiologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.8	Surat Permintaan Bahan Habis Pakai untuk pemeriksaan TCM GenXpert TB		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.5.9	Surat Pengiriman Sampel Malaria	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.5.10	Surat Pengantar Pemberitahuan Penyelesaian Pemeriksaan TCM GenXpert TB	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.11	Surat permintaan Bahan Habis Pakai atau Reagan (Rapid Antigen) VTM, Masker N95, Anti HCV,HIV, Dan lain-lain)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.12	Surat Pengantar Pemberitahuan Penyelesaian Pemeriksaan HIV Viral Load	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.13	Surat pengiriman sampel SGTF	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.5.14	Surat pengiriman sampel EID (Early Infant Diagnosis (Dikrim Ke RSUD.Dr.Sutomo)	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.5.15	Surat permintaan Bahan Habis Pakai ke KEMENKES RI	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.16	Surat Penambahan atau Up grade Alat ke PT yg bekerjasama dengan Lab (KSO Alat)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.17	Surat Permintaan Uji Fungsi dan Kesesuaian Alat Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.18	Surat Berita Acara Kerusakan Alat Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.19	Surat Telaah Permintaan Kalibrasi Alat Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.20	Surat permintaan barang dan spare part alat kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.21	Surat hasil report pemeriksaan alat kesehetan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.22	Surat bukti penyerahan barang alat kesehatan dari rekanan pihak ke-3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.23	Surat permintaan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kesehatan ke rekanan pihak ke-3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.24	Surat berita acara kerusakan barang ke Instalasi terkait	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.25	Surat permintaan pengadaan barang fasilitas sarana dan prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.26	Pengelolaan pelayanan radiologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

41								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.5.27	Pengelelolaan bahan habis pakai radiologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.28	Pengelolaan pengembangan SDM (pendiidkan dan pelatihan serta kebutuhan staf)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.29	Pengelolaan laporan dan evaluasi pelayanan radiologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.30	Pengelolaan perizinan dan sertifikasi alat radiologi		Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.5.31	Pengelolaan peralatan dan maintenance alat radiologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.5.32	Pengelolaan proteksi radiasi radiologi		Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.6	Kesehatan Jiwa						
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkoba dan sejenisnya		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra					
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.7.2	Imunisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.7.4	Kesehatan matra	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung					
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang					
	400.7.9.1	Pengendalian malaria	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular					
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

43								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.10.3	Penyakit kanker		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11	Penyehatan lingkungan						
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.6	Penyelenggaraan Penyehatan Tanah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.7	Penyelenggaraan Penyehatan Sarana dan Bangunan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.8	Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.9	Penyelenggaraan Pengawasan Linen (Laundry)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.10	Penyelenggaraan Pengawasan Proses Dekontaminasi Melalui Disinfeksi dan Sterilisasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.11	Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Konstruksi/Renovasi Bangunan dan Rumah Sakit		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.11.12	Penyelenggaraan Pengawasan Rumah Sakit Ramah Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13	Gizi						
	400.7.13.1	Gizi makro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13.2	Gizi mikro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



44

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.14	Kesehatan ibu					
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.14.4	Keluarga berencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.15	Kesehatan anak					
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer					
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga					
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.17.2	Kapasitas kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.17.3	Lingkungan kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.18	Obat Publik dan perbekalan kesehatan					

45								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.18.1	Harga obat publik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.18.2	Pengadaan obat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan						
	400.7.19.1	Produksi dan distribusi alat kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.20	Kefarmasian						
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.20.2	Farmasi klinis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.20.5	Komite farmasi dan terapi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian						
	400.7.21.1	Obat tradisional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan						
	400.7.22.1	Surat keterangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.22.3	Surat visum korban hidup		Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban	Unit pengolah terkait

46						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.22.4 Surat visum jenazah	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan					
	400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.23.3 Pemantauan dan informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.23.6 Pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.23.7 Pencegahan, pengendalian dan penanganan PAK dan KAK	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.23.8 Pengembangan progra penanganan B3 dan limbah	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit pengolah terkait
	400.7.23.9 Pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan kerja dan sarana prasarana	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait
	400.7.23.10 Pengelolaan sistem utilitas	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.7.23.11	Pengembangan menejemen tanggapan darurat bencana	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait
	400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.25	Intelegensia Kesehatan					
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.26	Kesehatan Haji					
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.27	Promosi Kesehatan					
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.27.4	Hari kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.28	Data dan Informasi					
	400.7.28.1	Statistik kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen					
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

48

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya							
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	400.7.31	Rekam Medis		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait	
8	400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN							
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.8.2	Fasilitasi							
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.8.2.4	Kasus Keagamaan			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME							
	400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

49

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
9	400.9	SOSIAL					
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak					
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial					
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit Pengolah Terkait
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial					
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

50

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia					
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial					
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam					
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.10.4	Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.11	Jaminan Sosial					
	400.9.11.1	Seleksi dan vrifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	400.9.11.4	Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial					
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil					
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



52

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan					
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.14.5	Bantuan Langsung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial					
	400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
10	400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan					
	400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat					
	400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.4	Pemberdayaar Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat					
	400.10.4.1	Budaya Nusa: Budaya Nusantara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.4.2	Pemberdayaa: Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.4.3	Pemberdayaa: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.4.4	Kesejahteraar Kesejahteraan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.4.5	Tenaga Kerja Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat					
	400.10.5.1	Usaha Pertan: Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.5.2	Usaha Perkre: Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.5.3	Produksi dan Produksi dan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.5.4	Usaha Ekono: Usaha Ekonomi dan Keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.5.5	Ekonomi Perd: Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan					
	400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

54

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
11	400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN						
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.2	Pertamanan					
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.2.2	Taman Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.3	Pemakaman					
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.3.2	Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.4	Jalur Hijau					
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.7	Pengelolaan Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
12	400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk					
	400.12.2.1	Identitas Penduduk	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

55

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.3	Pencatatan Sipil					
	400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

56

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan					
	400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.5.2	Kualitas Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.6	Penyerasian Kependudukan					
	400.12.6.1	Indikator Kependudukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

57

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
13	400.13 KELUARGA BERENCANA						
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk					
	400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk					
	400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk					
	400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk					
	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk					
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.7	Pengembangan Sistem					
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.8	Pengembangan Materi					
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi					
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

58						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.13.9.2    Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.10   Analisis Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.11   Analisis Ekonomi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.12   Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.13   Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.14   Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.15   Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.16   Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah					
	400.13.16.1   Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.16.2   Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.17   Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.18   Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.19   Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta					
	400.13.19.1   Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.19.2   Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.20   Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan					
	400.13.20.1   Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.20.2   Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.21   Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan					
	400.13.21.1   Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.21.2   Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.22   Kesertaan keluarga berencana pria					
	400.13.22.1   Peningkatan akses keluarga berencana pria	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

59

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak					
	400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak					
	400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja					
	400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja					
	400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan					
	400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan					
	400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan					



60

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.13.32.1    Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.32.2    Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.33    Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.34    Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.35    Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga					
	400.13.35.1    Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.35.2    Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.36    Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.37    Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.38    Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					
	400.13.38.1    Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.38.2    Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.39    Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					
	400.13.39.1    Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.39.2    Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.40    Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi					
	400.13.40.1    Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.40.2    Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.41    Advokasi dan pencitraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.42    Komunikasi, Informasi dan Edukasi					
	400.13.42.1    Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.42.2    Sarana produksi media komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.42.3    Produk media komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

61						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota					
	400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah					
	400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.46 Tenaga Lini Lapangan					
	400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan					
	400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan					
	400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan					
	400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.51 Analisis dan evaluasi					
	400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data					

62

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.52.2 Pengelolaan bank data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi					
	400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi					
	400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
14	400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT					
	400.14.1 Keprotokolan					
	400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan					
	400.14.4.1 Kliping koran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.4.2 Brosur/Leaflet/poster/plakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah					
	400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

63

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	400.14.5.5	Forum Kehumasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
VI	500 PEREKONOMIAN						
1	500.1 KETAHANAN PANGAN						
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.2.2	Akses Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan					
	500.1.3.1	Distribusi Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.3.2	Harga Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.3.3	Cadangan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan					
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan					

64

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.7	Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.8	Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2	500.2	PERDAGANGAN					
	500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri					
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	500.2.2.5	Pelaku Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

65								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.2.2.14	Informasi Pasar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.16	Barang Strategis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen						
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.4	Tata usaha		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.11	Jasa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.12	Kerjasama		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.16	Pengawasan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

66								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTT		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi						
	500.2.4.1	Pengkajian pasar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4.4	Pengkajian pasar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4.6	Sistem informasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.5	Bimbingan Teknis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.6	Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
3	500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM						
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2.5	Penyuluhan Koperasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2.6	Konsultan/PLUT		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

67

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.3.2.7	Pengawasan Koperasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.3.3	Produksi					
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.4	Pembiayaan					
	500.3.4.1	Program Pendanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.4.3	Urusan Permodalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha					
	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



68								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.6.5	Advokasi		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.3.6.6	Pengembangan Usaha Mikro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.6.7	Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.6.8	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha						
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.7.6	Pameran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK						
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.8.2	Penelitian UKM		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.9.1	Koordinasi dan Konsultasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

69

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.3.9.2	Perjanjian Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.9.3	Nota Kesepahaman (MoU)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)					
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.12	Laporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
4	500.4	KEHUTANAN					
	500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2	Penyuluhan					
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.3	Program Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.8	Deseminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.3	Planologi Kehutanan					
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

70

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

71

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4	Bina Usaha Kehutanan					
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

72

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.4.3	Kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.5	Perpanjangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.7	Investasi Industri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.8	Peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.9	Tenaga Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.10	Pemegang Saham	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

73

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.17	Produksi Kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.18	Produksi non kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.21	Industri Non Kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

74

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.25	Pemblokiran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.26	Denda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

75

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan					
	500.4.5.1	Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.3	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam					
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

77

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial					
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.2	Kebun Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.3	Tegakan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.4	Pengadaan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.7	Pembibitan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan					
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

78

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.8.3	Diseminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.8.4	Gelar Teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
5	500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2	Perikanan Tangkap					
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.14	Kenelayanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

79								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.2.17	Fasilitas Perizinan (antara lain: Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan/SKP)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.18	TPI/PPI		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.2.19	Kesyahbandaran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3	Perikanan Budidaya						
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.3.17	Residu Ikan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						

80

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.2	Pengembangan Produk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.4	Industri Pengolahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.8	Pengembangan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.18	Pengembangan Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

81								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.4.25	Rekomendasi Kelayakan Pengolahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil						
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi		Sangat Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I		Sangat Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II		Sangat Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

82

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	Sangat Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.17	Akses Permodalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan					
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

83

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait



84

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.17	Penyidikan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

85									
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.6.21	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7	Karantina Ikan							
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.2	Penahanan			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.3	Pengasingan			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.4	Pengamatan			Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

86

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.7.5	Pengakuan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.6	Penolakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.7	Pemusnahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

87

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.14	Surat Perintah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.15	Rekomendasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

88								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.5.7.21	Lokasi Karantina		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
6	500.6	PERTANIAN						
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.2	Perlindungan hortikultura						
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura (Budidaya dan Pascapanen)						
	500.6.3.1	Penilaian Varietas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.3.4	Budidaya dan Pascapanen Tanaman Buah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.3.5	Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Sayur dan Tanaman Obat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan						
	500.6.4.1	Basis Data Lahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.4.6	Jalan Usaha Tani		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi						
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

89								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.5.4	Kelembagaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian						
	500.6.6.1	Pembiayaan Program		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.7	Pupuk Pestisida						
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.7.3	Pestisida		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian						
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan						
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.10	Budidaya Serealia						
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

90

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.6.10.3	Jagung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.10.4	Serealiala Lain	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi					
	500.6.11.1	Kedelai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.11.2	Ubi Kayu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.11.3	Aneka Kacang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.11.4	Aneka Umbi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.11.5	Gudang Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12	Tanaman Pangan					
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.5	Sosialisasi DPI Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.6	Gerdal OPT Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.7	Sosialisasi OPT Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.8	Gerdal DPI Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.9	Gerdal OPT Hortikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.10	Klinik PHT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.11	Penerapan PHT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.12.12	DPI Hortikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan					
	500.6.13.1	Padi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

91

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.6.13.2 Jagung dan Sereal <span>ia</span> alin	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.13.4 Aneka Umbi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian					
	500.6.14.1 Tanaman Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.14.2 Holtikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.14.3 Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.14.4 Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.15 Mutu dan Standarias <span>i</span>					
	500.6.15.1 Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.15.5 Sertifikasi Tanaman Pangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.15.6 Sertifikasi Tanaman Hortikultura	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi					
	500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.16.2 Investasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.16.4 Promosi Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <span>siapa</span> apun.	Unit pengolahan terkait
	500.6.17 Pemasaran Domestik					



92

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.6.17.1	Informasi Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan					
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.20	Diseminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian					
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					
	500.6.26.1	Hak Cipta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

93

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.26.4	Hak Merek	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian					
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.28	Pelayanan Hukum					
	500.6.28.1	Sertifikasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.29	Karantina Pertanian					

94

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.6.29.1 Karantina Tumbuhan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.29.2 Karantina Hewan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.6.30 Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.31 Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.32 Penyuluhan Pertanian					
	500.6.32.1 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.32.2 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.32.3 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.32.4 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.32.5 Korporasi Petani	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.32.8 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.33 Pendidikan dan Pelatihan Pertanian					
	500.6.33.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.33.2 Materi Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.33.5 Panduan fasilitator	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.33.6 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.34 Penyelenggaraan Diklat Pertanian					
	500.6.34.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.34.2 Sistem Informasi dan bahan ajar diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.34.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
7	500.7 PETERNAKAN					

95

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.2.2	Pakan Ternak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.2.3	Budidaya Ternak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.3	Bimbingn Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.4	Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.5	Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan					
	500.7.5.1	Data dan Informasi Peternakan (Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.7.5.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
8	500.8	PERKEBUNAN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
	500.8.2	Tanaman Semusim					
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar					
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.4	Tanaman Tahunan					

96

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan					
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha					
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
9	500.9	PERINDUSTRIAN					
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama					
	500.9.2.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.2.2	Industri Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.3	Promosi Industri					
	500.9.3.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

97

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.3.5	Pameran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi						
	500.9.4.1	Industri Manufaktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.4.2	Industri Agro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual						
	500.9.5.1	Industri Manufaktur		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.9.5.2	Industri Agro		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.9.6	Industri Hijau						
	500.9.6.1	Industri Manufaktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.6.2	Industri Agro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

98

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.8.1	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.9.1	Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.9.9.2	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.9.9.3	Kawasan Ekonomi Khusus	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.9.9.4	Sentra IKM	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.9.9.5	Kawasan Peruntukan Industri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.9.9.6	Kawasan Industri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.12	Standarisasi					

99

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.9.12.1	Standar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri					
	500.9.13.1	Kebijakan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.13.4	Izin Usaha Industri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup					
	500.9.14.1	Industri Hijau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.14.3	Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual					
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.17	Fasilitasi Pengembangan Industri Kerajinan Khas Daerah					
	500.9.17.1	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.18	Koordinasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.19	Informasi Industri					
	500.9.19.1	Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.19.2	SIINas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.20	Sumber Daya Industri					



100

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.9.20.1	Sumber Daya Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.20.2	Sumber Daya Manusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.20.3	Sarana dan Prasarana Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.21	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.22	Laporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
10	500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.2	Rekomendasi Kegeologian					
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.2.3	Pertambangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.2.4	Panas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.2.5	Geosains	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.3 Penelitian Kegeologian					
	500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.6 Sumber Daya Geologi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.9 Survei Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian					
	500.10.4.1 Sumber Daya Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.4.4 Survei Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.4.5 Konservasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi					

102

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.5.4	Survei Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi					
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi					

103

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.7.7	Partisipasi Interest	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi					
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.9	Teknik dan Lingkungan					

104

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.9.10	Usaha penunjang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi					
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

105

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12 Panas Bumi					
	500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.8 Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

106

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.13 Bioenergi					
	500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.2 Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.5 Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	500.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.14 Aneka Energi					
	500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.15 Konservasi Energi					
	500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

107

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE					
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik					
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan					
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan					
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



108

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.20	Sertifikasi					
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.22	Standarisasi Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan					
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan					
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara					
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

109						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral					
	500.10.26.1 Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.12 Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara					
	500.10.27.1 Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
	500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.27.12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
	500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban	Unit Pengolah Terkait
	500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	500.10.28 Penerimaan Negara					
	500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNPB	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara					
	500.10.29.1 Perumusan RSNi (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.11 Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.15 Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.29.16 Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.29.17 Pengawasan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.29.19 Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan					
	500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.30.3 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

113						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.31 Sarana Litbang					
	500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.32 Afiliasi					
	500.10.32.1 Proyek Percontohan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.32.4 Penyajian Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian					
	500.10.33.1 Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.33.2 Energi Kelautan dan Wilayahahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi					
	500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

114

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.10.34.2    Teknologi Eksploitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.34.3    Laboratorium	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.34.4    Study	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.34.5    Teknologi Proses	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.34.6    Teknologi Aplikasi Produk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.34.7    Teknologi Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.35    Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara					
	500.10.35.1    Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.35.2    Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.35.3    Teknologi Pemanfaatan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.36    Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan					
	500.10.36.1    Energi baru terbarukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.36.2    Teknologi Ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.36.3    Lingkungan dan    Konservasi Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.36.4    Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)    dan Konservasi Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
11	500.11    PERHUBUNGAN					

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.1.1	Rekomendasi Izin Rencana Induk Pelabuhan Provinsi (RIPP) dan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKr)/Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKp)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.1.2	Rekomendasi Izin Pelabuhan Ship to Ship (STS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.1.3	Rekomendasi Izin Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Khusus Kepentingan Sendiri (TUKS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan					
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan					
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor					
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor					
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.5.4 Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
	500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.7 Perlengkapan Jalan					
	500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.8 Angkutan Penumpang					
	500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.8.7 Angkutan perintis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.9 Angkutan Barang					
	500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.9.2 Tarif angkutan barang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

117

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.10	Monitoring Operasional					
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil					
	500.11.11.1	Pedoman Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.11.3	Bimtek PPNS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan					
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.15.3	Standar pelayanan minimal (SKM) kapal sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan					

118						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan					
	500.11.18.1 Manajemen lalu lintas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan					
	500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan					
	500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.21 Tarif dan Keperintisan					
	500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan					
	500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan					
	500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.24 Angkutan Perkotaan					
	500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.11.25 Pemadu Moda Transportasi Perkotaan					
	500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.25.2 Pemadu moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun	Unit pengolah terkait
	500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan					
	500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan					
	500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.28 Pengembangan Keselamatan					
	500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan					
	500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

120						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum					
	500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.31 Audit Keselamatan					
	500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.32 Inspeksi Keselamatan					
	500.11.32.1 Pedoman keselamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.33 Parkir					
	500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.34 Lingkungan Perhubungan (antara lain: Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Terminal, Pelabuhan dan Bandara)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.35 Perkeretaapian					
	500.11.35.1 Pintu lintas kereta api	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun	Unit pengolah terkait
	500.11.35.2 Signal/tanda rambu perkeretaapian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun	Unit pengolah terkait
	500.11.35.3 Perizinan perkeretaapian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun	Unit pengolah terkait
	500.11.35.4 Sarana dan prasarana meliputi lokomotif, gerbong, bogie (jalan/jembatan) perkeretaapian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun	Unit pengolah terkait
	500.11.35.5 Trayek perkeretaapian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun	Unit pengolah terkait
	500.11.35.6 Angkutan Penumpang, angkutan barang perkeretaapian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.35.7 Keselamatan Perkeretaapian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait

121

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.11.35.8	Kecelakaan perkeretaapian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.35.9	Perawatan/perbaikan perkeretaapian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
12	500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.2	Telekomunikasi					
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.3	Penyiaran					
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal					
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.5	Pengendalian Informatika					
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.6	e- Government					

122

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.7	e- Business					
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

123

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat					
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika					
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.10	Keamanan Informasi					
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait



124						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.11 Komunikasi Publik					
	500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi					
	500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.12.2 Informasi Perekonomian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.13 Pengelolaan Media Publik					
	500.12.13.1 Media Cetak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.13.2 Media Online	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.14 Kemitraan Komunikasi					
	500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.15 Infrastruktur Informatika					
	500.12.15.1 Jaringan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

125						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.12.15.3 Keamanan Informatika	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.16 Sistem dan Data					
	500.12.16.1 Portal dan Konten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.12.17 Pusat Kerjasama					
	500.12.17.1 Kerja Sama daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat					
	500.12.18.1 Pelayanan Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.18.2 Hubungan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.18.3 Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.18.4 Pers/Media/Massa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.18.5 Pameran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.18.6 Sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.19 Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.20 Publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

126

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.12.20.1	Penerbitan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.20.2	Dokumentasi					
	500.12.21	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.21.1	Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika					
	500.12.22	Perumusan Kebijakan Bidang Statistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.22.1	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.22.2	Penyiapan Kebijakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.22.3	Masukkan dan Dukungan dalam Penyusunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.22.4	Pengembangan Desain dan Standarisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.22.5	Penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NPSK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.23	Sensus dan Survei Sektoral					
	500.12.23.1	Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.23.2	Persiapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.23.3	Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.23.4	Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.23.5	Pengolahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.23.6	Analisis Dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.23.7	Diseminasi Hasil Sensus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.24	Evaluasi dan Pelaporan Survei dan Konsolidasi Data					
	500.12.24.1	One Data One Map	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
13	500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata					
	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata (antara lain: Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Kawasan Pariwisata, Kawasan Strategis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

127

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.13.2.3	Industri Pariwisata (antara lain: Pembinaan/Pengawasan Usaha Pariwisata, Investasi Pariwisata, Fasilitas/Standarisasi)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (antara lain: Kelompok Sadar Wisata)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata						
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (antara lain: Tourism Information Centre)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri (antara lain: Pameran Luar Negeri, Event Promosi, Foto/Video)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri (antara lain: Pameran Dalam Negeri, Event Promosi, Duta wisata/Putri Pariwisata, Foto/Video)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.3.5	Promosi dan informasi Potensi dan peluang investasi daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal yang mempunyai hak	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.3.6	Promosi dan informasi Potensi wisata dan budaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal yang mempunyai hak	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.3.7	Promosi dan informasi tentang IKN		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal yang mempunyai hak	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.3.8	Promosi dan informasi tentang Mess Kaltim di Jakarta		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal yang mempunvai hak	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya						
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.4.4	Pengelolaan Anjungan TMII		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal yang mempunyai hak akses	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.4.5	Pengembangan Anjungan TMII		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal yang mempunyai hak akses	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.4.6	Peningkatan fasilitas promosi produk unggulan dan seni budaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal yang mempunyai hak akses	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.4.7	Kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya						
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK						
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

128

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi (antara lain: Sarana & Prasarana Ekonomi Kreatif)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (antara lain: Kemitraan SDM Parekraf, SDM Usaha Pariwisata, SDM Ekonomi Kreatif)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (antara lain: Pramuwisata)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
14	500.14	STATISTIK					
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi					
	500.14.2.1	Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.3	Survei					
	500.14.3.1	Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.3.2	Persiapan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner ), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

129

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.4	Konsolidasi Data Statistik					
	500.14.4.1	Kompilasi Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.4.2	Analisis data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
15	500.15 KETENAGAKERJAAN						
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja					
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi					
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja					
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan					
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

130

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.6	Bina Pemagangan					
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan					
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja					
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.8.3	Bursa Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.8.4	Analisis Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri					
	500.15.9.1	Antar Kerja    Antar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal					
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.15.10.4    Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.11    Standardisasi Profesi					
	500.15.11.1    Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.11.2    Pembakuan Akreditasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.12    Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi					
	500.15.12.1    Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.12.2    Perjanjian Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.12.3    Kesejahteraan Pekerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.12.4    Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.13    Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial					
	500.15.13.1    Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.13.2    Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.13.3    Pemasarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.14    Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial					
	500.15.14.1    Pengupahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.14.2    Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.15    Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial					
	500.15.15.1    Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.15.2    Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.15.3    Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	500.15.16    Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
	500.15.16.1    Pengawasan Norma Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.16.2    Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.16.3    Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.17    Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak					
	500.15.17.1    Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.17.2    Pengawasan Norma Kerja Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



132						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.20 Bina Penegakan Hukum					
	500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
	500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
	500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
16	<b>500.16 PENANAMAN MODAL</b>					
	500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal					
	500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
	500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.4 Promosi Penanaman Modal					
	500.16.4.1 Pengembangan Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

134

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.4.4	Promosi Sektoral		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal						
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

135

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal						
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
17	500.17	PERTANAHAN						
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan						
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh	Unit pengolah terkait
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah						
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

136

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.17.4	Sengketa Tanah					
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
18	500.18	TRANSMIGRASI					
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi					
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

137

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi					
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi					
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

138

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.5	Partisipasi Masyarakat					
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi					
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat					
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.8	Pengembangan Usaha					
	500.18.8.1	Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.8.2	Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan					
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan					
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



140

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
VII	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN					
1	600.1	PEKERJAAN UMUM					
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air					
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.1.2.2	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air					
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.3.2	Manajemen Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air					
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air					
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

141

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.5.5	-	-	-	-	-	-
	600.1.6	-					
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan					
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Karena akan memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD	Bidang Terkait
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.8	Pembangunan Jalan					
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.9	Preservasi Jalan					
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.10	Pengelolaan Jembatan					
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.10.3	Teknik Jembatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sianapun.	Unit pengolah terkait

142

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah					
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.11.4	Konektifitas jaringan jalan pusat dan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.12	Pengaturan Jalan Tol					
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman					
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman					

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.14.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan					
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.15.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.16.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman					
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.17.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
2	<b>600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>						
	600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan					
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.2.3	Kemitraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait
	600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan					
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan					
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan					
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.5.2	Analisa Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

145

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.6	Penyediaan Rumah Susun					
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.6.2	Penyediaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.6.4	Pengelolaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus					
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial					
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.9	Investasi Infrastruktur					
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.10.4	Manajemen Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi					
	600.2.11.1	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi					
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

147

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi					
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi					
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi					
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.15.2	Pengembangan Materi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)					
	600.2.16.1	Antar Sektor	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.16.2	Antar Wilayah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis					



148

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan					
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
3	600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)					
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.3.2	Perencanaan					
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

149

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian					
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.3.4	Pemetaan					
	600.3.4.1	Peta Dasar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

150

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
4	600.4 LINGKUNGAN HIDUP						
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					
	600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor					
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.5	Dampak Lingkungan					
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan					

151

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan						
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan						
	600.4.8.1	Pengembangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.8.2	Pemanfaatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.8.4	Keamanan Hayati		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat						
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.9.2	Rawa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer						
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim						
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun					
	600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun					
	600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3					
	600.4.14.1 Pemantauan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.4.15 Pengelolaan Sampah					
	600.4.15.1 Pembatasan sampah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan					
	600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan,	Apabila diketahui oleh	Unit Pengolah
	600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan					
	600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan					
	600.4.18.1	Penyidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan					
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat					
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat					
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan					
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan					
	600.4.23.1	Pengelolaan Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan					
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

154

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi						
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan						
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas LIngkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
VIII	700	PENGAWASAN						
1	700.1	PENGAWASAN INTERNAL						
	700.1.1	Rencana Pengawasan						
	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan						

NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Inspektorat
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Inspektorat
	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Inspektorat
	700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
	700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
IX	800	KEPEGAWAIAN						
1	800.1	SUMBER DAYA MANUSIA						
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara						
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai						
	800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



156								
NO	JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.3	Mutasi Pegawai						
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara,		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit Pengolah Terkait
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.4	Pengembangan Karir					
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara					
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.1.5.3      Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	800.1.6      Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN					
	800.1.6.1      Kode Etik Pegawai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	800.1.6.2      Disiplin	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	800.1.6.3      Pemberhentian Dengan Hormat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.6.4      Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.6.5      Pemberhentian Sementara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.6.6      Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.7      Bantuan Hukum	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.8      Status dan Kedudukan Pegawai					

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.1.8.1	Status Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian					
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.10	Pengawasan dan pengendalian					

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.1.10.1      Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.10.2      Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.10.3      Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.10.4      Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.10.5      Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.10.6      Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11      Administrasi Pegawai					
	800.1.11.1      Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.2      Cuti Sakit	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

161						
NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.1.11.3      Cuti Bersalin	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.4      Cuti Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.5      Cuti Alasan Penting	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.6      Cuti Besar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.7      Cuti Di luar Tanggungan Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.8      Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.9      Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.10      Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.11      Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

162

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.12	Kesejahteraan Pegawai					
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.4	Bantuan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.5	Pakaian Dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.10	Rekam Medis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.13	Administrasi Perseorangan					
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

163

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.14	Penilaian Kompetensi					
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
2	800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan					
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait



164

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	800.2.2.4	Modul-modul diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.5	Panduan fasilitator	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3	Widyaiswara					
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat					
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.5	Alumni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
X	900	KEUANGAN					
1	900.1	KEUANGAN DAERAH					

165

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)					
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.1.5	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.1.6	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.2	Penyusunan Anggaran					
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	900.1.3	Pelaksanaan Anggaran					
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.2	Pendapatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.3	Belanja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.7	Daftar Gaji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.8	Kartu Gaji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.10	Laporan Keuangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri					

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

167

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	900.1.4.11	Report /Laporan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.13	Completion Report/ Annual Report	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)					
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan					
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan					
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Matriks Pelaksanaan Pilkada, Baku PBB Pilkada, Baku PBB Pilkada, Baku PBB Pilkada)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu					
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah					
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit Pengolah Terkait
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	900.1.12	Anggaran Daerah					
	900.1.12.1	Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah					
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitas pelaksanaan kebijakan standarisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitas pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standarisasi teknis, fasilitas serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standarisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitas serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitas serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitas pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitas pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitas pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.14	Fasilitas Dana Perimbangan					
	900.1.14.1	Fasilitas Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.14.2	Fasilitas Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitas Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah					
	900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK